



**PENGUATAN
PENDIDIKAN
KARAKTER
DALAM
MASYARAKAT
MULTIKULTUR
DI KALIMANTAN
BARAT DAN
SULAWESI
TENGAH**

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI KALIMANTAN BARAT DAN SULAWESI TENGAH

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2020

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KALIMANTAN BARAT DAN SULAWESI TENGAH

Penulis:

Mikka Wildha Nurrochsyam, S.S, M. Hum. (Kontributor utama)

Genardi Atmadiredja, M. Sn. (Kontributor Anggota)

Irawan Santoso Suryo Basuki, M. Sc. (Kontributor Anggota)

Agus Sudarmadji, S. Kom, M.M. (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-68-2

Penyunting:

Dr. Eviana Hikamudin, S.Pd., M.M.

Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum.

Nur Listiawati, S.S., M.Ed.

Tata Letak:

Fadhilah Darma Sulisty, S.Kom.

Desain Cover:

Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Dalam kesempatan ini saya menyambut baik atas terselesainya buku yang berjudul: “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur”. Buku ini merupakan revisi hasil penelitian dari program Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Balitbang Kemendikbud yang dilaksanakan Puslitjak pada tahun 2019 dengan judul yang sama yang disajikan dalam format buku.

Buku ini memaparkan implementasi pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur. Keragaman yang ada di Indonesia baik etnis dan agama kalau tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persoalan secara serius. Diharapkan buku ini dapat memberikan masukan baik dari segi materi maupun implementasi pendidikan karakter yang efektif dalam pembelajaran kepada peserta didik.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai masyarakat multikultur, seperti kerukunan, persaudaraan, toleransi, keadilan, kejujuran, dan nilai komunikatif. Kesadaran sikap terhadap nilai-nilai multikultur yang telah ditanamkan akan berimbas kepada sikap peserta didik. Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial diharapkan peserta didik dapat bersikap etis di tengah masyarakat.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi unit-unit yang terkait dengan pendidikan karakter: antara lain Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan satuan-satuan pendidikan di daerah rawan konflik sosial dan budaya.

Saya menyampaikan terimakasih kepada tim penulis atas kerja kerasnya dari penelitian dan penulisan laporan hingga mempublikasikan hasil penelian ini dalam bentuk buku. Kiranya penelitian dan penulisan ini dapat berguna bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2020

Plt. Kepala Pusat

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Buku yang berjudul “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah” bertujuan untuk menyampaikan gagasan kepada pengampu kepentingan dan pembaca secara umum mengenai problem pendidikan karakter dalam masyarakat Indonesia yang plural. Problem tersebut ke depan dimungkinkan terus bergulir, seperti persoalan antar etnis, agama, dan persoalan kelompok serta golongan, yang seringkali menimbulkan perpecahan yang mengancam kesatuan NKRI. Untuk itu perlu upaya penguatan karakter untuk mengajarkan peserta didik agar mampu bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Dalam aspek pendidikan, buku ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan karakter bagi peserta didik. Penguatan pendidikan karakter peserta didik dilaksanakan dengan bereksperimen dan merefleksikan nilai karakter religius tidak hanya bersifat ritual simbolik tetapi dilaksanakan melalui praktek langsung melalui kepedulian sosial, toleransi dan solidaritas. Demikian pula dengan karakter nasionalis dan kemandirian.

Buku ini membahas tiga karakter dari lima karakter utama dalam PPK yaitu religiusitas, nasionalisme dan kemandirian. Strategi implementasi

karakter utama dalam PPK dapat dilaksanakan dalam tiga jalur. Pertama, melalui intrakurikuler yang dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti mata pelajaran seni budaya dapat digunakan sebagai media pembelajaran keragaman. Kedua, dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler, melalui kegiatan penunjang seperti permainan tradisional; dan ketiga melalui jalur ekstrakurikuler, yaitu aktivitas di luar jam pelajaran seperti pramuka, kesenian dan kegiatan lainnya.

“Tidak ada gading yang tak retak.” Buku ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran selalu terbuka terhadap tulisan ini untuk kebaikan dan Penguatan Pendidikan Karakter dalam masyarakat Indonesia yang plural. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR DIAGRAM	XI
BAB I PERMASALAHAN PENDIDIKAN KARAKTER DI DAERAH MULTIKULTUR	1
A. Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah Beragam Sosial dan Budaya	1
B. Perspektif Etika Masyarakat Multikultur	7
BAB II IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KALIMANTAN BARAT	15
A. Kalimantan Barat yang Beragam	15
B. Karakter Utama Religiusitas, Nasionalisme, dan Kemandirian di Kalimantan Barat	17
1. Implementasi Karakter Utama Religius	18
2. Pengajaran Agama secara Tekstual	19

3. Pengajaran Agama secara Kontekstual	21
4. Sikap Kritis dan Rasionalitas dalam Religiusitas	23
5. Mengajarkan Toleransi Antarumat Beragama	25
6. Implementasi Karakter Nasionalisme	26
7. Implementasi Karakter Kemandirian	32
 BAB III IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN	
KARAKTER DI SULAWESI TENGAH	39
A. Sulawesi Tengah yang Beragam	39
B. Karakter Utama Religius, Nasionalisme, dan Kemandirian di Sulawesi Tengah	41
1. Implementasi Karakter Religius	41
2. Implementasi Karakter Nasionalisme	50
3. Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman	53
4. Mengajarkan Sikap Taat kepada Hukum	55
5. Implementasi Karakter Kemandirian	56
 BAB IV TANTANGAN IMPLEMENTASI PPK DI DAERAH	
MULTIKULUR	63
 DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur	18
Tabel 2 Pengajaran Agama secara Tekstual	20
Tabel 3 Lokasi Penelitian * Mengajarkan Agama Secara Kontekstual	21
Tabel 4 Mengajarkan Sikap Kritis dan Rasional dalam Beragama	24
Tabel 5 Mengajarkan Sikap Komunikatif dalam Agama	25
Tabel 6 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur	27
Tabel 7 Mengajarkan Sikap Cinta Tanah Air	28
Tabel 8 Mengajarkan Sikap Komunikatif Antarkelompok yang Beragam	30
Tabel 9 Mengajarkan Sikap Taat Hukum	31
Tabel 10 Karakter Utama Kemandirian dalam Masyarakat Multikultur	33
Tabel 11 Mengajarkan Sikap Demokratis	34
Tabel 12 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme	37
Tabel 13 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Etnosentrisme	38
Tabel 14 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur di Wilayah Kota Palu dan Kabupaten Poso	42
Tabel 15 Mengajarkan Agama secara Tekstual Tabulasi Silang (Crosstabulation)	43
Tabel 16 Mengajarkan Agama secara Kontekstual	44
Tabel 17 Mengajarkan Sikap Kritis dan Rasional dalam Beragama	47
Tabel 18 Mengajarkan Sikap Komunikatif dalam Agama	48
Tabel 19 Mengajarkan Toleransi Beragama	49
Tabel 20 Mengajarkan Hidup Rukun dan Damai Antarpemeluk Agama Lain	50
Tabel 21 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur di Wilayah Palu dan Poso	50
Tabel 22 Mengajarkan Sikap Cinta Tanah Air	52

Tabel 23 Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman	54
Tabel 24 Mengajarkan Sikap Komunikatif Antarkelompok yang Beragam	54
Tabel 25 Mengajarkan Sikap Taat Hukum	55
Tabel 26 Karakter Utama Kemandirian dalam Masyarakat Multikultur	57
Tabel 27 Mengajarkan Sikap Demokratis	58
Tabel 28 Mengajarkan Sikap Komunikatif	59
Tabel 29 Mengajarkan Sikap Sportif	60
Tabel 30 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme	60
Tabel 31 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Etnosentrisme	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Mengajarkan Agama yang Perlu Dipraktikkan untuk Kesalehan Sosial	22
Diagram 2 Mengajarkan Agama yang Menjadi Rahmat bagi Alam Semesta	23
Diagram 3 Mengajarkan Sikap Menjaga Lingkungan	32
Diagram 4 Mengajarkan Sikap Komunikatif Membangun Kepribadian	35
Diagram 5 Mengajarkan Sikap Sportif	36
Diagram 6 Mengajarkan Agama yang Perlu Dipraktikkan untuk Kesalehan Sosial	45
Diagram 7 Mengajarkan Agama yang Menjadi Rahmat Alam Semesta	46
Diagram 8 Mengajarkan Sikap Menjaga Lingkungan	56

B A B I

PERMASALAHAN PENDIDIKAN KARAKTER DI DAERAH MULTIKULTUR

Bab ini akan menguraikan permasalahan pendidikan karakter yang terdapat di daerah multikultur. Dalam masyarakat yang plural sering kali terjadi dinamika interaksi sosial yang intens, bahkan sering kali menimbulkan konflik. Karena itu, pendidikan karakter di daerah seperti ini perlu berorientasi pada nilai-nilai masyarakat multikultur yang harmonis untuk diimplementasikan kepada peserta didik. Tulisan selanjutnya diuraikan mengenai perspektif etika sebagai argumentasi ilmiah yang dapat menjelaskan isu-isu yang terdapat dalam masyarakat multikultur, sedangkan pada bagian akhir bab ini sekilas akan dipaparkan sistematika penulisan buku ini.

A. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI DAERAH BERAGAM SOSIAL DAN BUDAYA

Kebijakan pendidikan karakter sudah mendapat perhatian pemerintah sejak lama. Pertama kali kebijakan itu dapat dirunut dari pidato kepresidenan Bung Karno pada 17 Agustus 1962 yang menyerukan pentingnya membangun karakter bangsa. Saat ini penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Berdasarkan hal tersebut,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016 seperti diamanatkan dalam pasal 1 (1) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Kebijakan pendidikan karakter terus dikembangkan hingga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 tahun 2018.

Dalam kurun pertama kali dimulai hingga kini implementasi pendidikan karakter selalu dievaluasi dan disempurnakan, yang salah satunya melalui penelitian yang berkelanjutan. Penelitian pendidikan karakter telah banyak dilakukan, antara lain, oleh Riswanda Setiadi dengan judul penelitian “Evaluasi Penyelenggaraan Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah *Piloting*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kegiatan sosialisasi penguatan pendidikan karakter (PPK) telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan komitmen untuk mendukung secara penuh PPK; (2) desain PPK sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan menempatkan nilai agama sebagai nilai khas; (3) implementasi PPK lebih dominan menggunakan pendekatan berbasis kelas dan budaya sekolah, tetapi masih belum menggunakan strategi berbasis komunitas; dan (4) evaluasi PPK menjadi bagian dari evaluasi pembelajaran dengan menggunakan instrumen pedoman pengamatan berupa skala dan terdapat perbedaan dampak PPK terhadap perkembangan nilai utama karakter berdasarkan jenjang sekolah (Riswanda Setiadi, dkk, 2017).

Penelitian yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter juga dilakukan oleh Ani Larasati. Penelitiannya memfokuskan implementasi pendidikan karakter pada kegiatan belajar dan mengajar di sekolah melalui pendidikan karakter berbasis budaya. Kesimpulannya mengatakan bahwa pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah dasar Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikenal oleh para kepala sekolah dan guru sebagai

pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan semua kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler (Larasati, 2014).

Selanjutnya, Bahtiyar Heru Susanto melakukan penelitian tentang pengembangan permainan tradisional dalam rangka pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Kesimpulannya mengatakan bahwa telah tersusun tiga jenis permainan tradisional yang dimodifikasi dan terintegrasi dengan perilaku karakter. Karakter yang diintegrasikan dalam permainan tersebut adalah karakter jujur dan disiplin. Permainan tradisional yang dikembangkan adalah mladok, gompot, dan si Boi (Susanto, 2017).

Penelitian yang terkait dengan pendidikan karakter dilakukan juga oleh Tim Puslitjakdikbud Bidang Kebudayaan pada tahun 2018, yaitu mengkaji sarana yang efektif untuk mentransformasikan nilai pendidikan karakter melalui permainan tradisional. Kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa permainan tradisional mengandung nilai intrinsik maupun ekstrinsik. Secara intrinsik nilai karakter utama *inheren* melekat pada permainan tradisional, sedangkan secara ekstrinsik nilai itu dilekatkan pada permainan tradisional karena permainan tradisional ditempatkan dalam konteks atau situasi tertentu. Penelitian itu berupaya mengeksplisitkan nilai-nilai karakter dalam permainan tradisional, selanjutnya menerapkan nilai-nilai itu dalam ranah pendidikan karakter, baik berbasis kelas, berbasis budaya sekolah maupun berbasis masyarakat (Nurrochsyam, 2018).

Dari penelitian terdahulu di atas belum ada satu pun penelitian yang melihat pendidikan karakter dalam perspektif etika yang meneliti nilai pendidikan karakter terkait dengan kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat multikultur. Pendidikan karakter perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural. Penekanan pada salah satu aspek akan menjadi dilema dengan nilai lainnya. Karena itu, pilihan atas nilai dalam pendidikan karakter perlu dicermati secara lebih mendalam sebelum diimplementasikan kepada peserta didik.

Ulasan dalam buku ini merupakan respon dari beberapa persoalan yang

seringkali muncul dalam masyarakat Indonesia yang beragam, di antaranya, adalah persoalan yang terkait dengan etnisitas dan agama yang di antaranya adalah persoalan mengenai radikalisme dan intoleransi.

Kondisi masyarakat Indonesia dengan beragam etnis, agama, dan bahasa menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara multikultur. Kemajemukan merupakan berkah tetapi sekaligus dapat menimbulkan berbagai persoalan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam masyarakat majemuk nilai nasionalisme menjadi sangat penting karena menjadi perekat keberagaman. Nasionalisme menjadi kekuatan integrasi sebuah masyarakat dalam negara, tanpa nasionalisme relasi sosial akan menjadi renggang. Nasionalisme menimbulkan spirit cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Sebuah bangsa tanpa nasionalisme sudah pasti akan runtuh.

Nasionalisme di era globalisasi saat ini menghadapi tantangan. Dalam masyarakat global terdapat dua hal yang bersifat paradok. Di satu sisi globalisasi ditandai dengan menguatnya nilai-nilai lokal yang heterogen, menguatnya nilai-nilai lokal ini seringkali menimbulkan konflik, berbagai bentuk kekerasan antaretnis seringkali dipicu karena problem suku bangsa, seperti di Sambas di Kalimantan Barat dan Mesuji di Lampung.

Di sisi lain globalisasi telah mengakibatkan homogenisasi sehingga nilai-nilai global menjadi acuan untuk mengatur tata kehidupan. Globalisasi telah memunculkan warga negara kosmopolitan yang digambarkan sebagai model ekspresi dari orang-orang yang bersifat multikulturalis pascanasional dari komunitas politik, yang mempertahankan lokus nasional dan juga memfasilitasi lokus global, regional, dan perkotaan dari status hukum dan keanggotaan politik (Horvath, 2009). Dalam masyarakat global jika problem sosial budaya diselesaikan dengan berorientasi pada kesatuan nasional apakah masih relevan?

Situasi negara Indonesia yang terdiri dari beragam jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang menimbulkan persoalan dalam hubungan sosial. Seringkali religiusitas tidak hanya dimaknai sebatas kesalehan dalam beribadah, tetapi seringkali menjadi

ideologi. Azyumardi Azra mengatakan bahwa konflik sosial bernuansa agama dapat merebak tidak hanya antaragama, tetapi juga intraagama (Azra, 2015). Religiusitas yang menjadi ideologi akan sulit untuk menerima pandangan lain di luarnya sehingga sering terjadi benturan ideologi atas nama agama dan kepercayaan yang memicu konflik dalam masyarakat. Situasi sosial dan budaya dalam masyarakat multikultur akan memengaruhi pertimbangan keputusan untuk implementasi pendidikan karakter kepada peserta didik.

Dalam masyarakat multikultur setiap orang dituntut untuk bersikap sesuai dengan etika tentang tingkah laku yang baik. Situasi masyarakat Indonesia yang plural memerlukan nilai karakter utama, seperti komunikatif, solidaritas, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan nilai-nilai lainnya yang menyatukan sehingga keutuhan masyarakat Indonesia menjadi solid. Transformasi nilai-nilai karakter utama dalam masyarakat multikultur itu akan menjadi efektif kalau dilaksanakan melalui pendidikan. Hal penting untuk dipikirkan adalah bagaimana karakter utama masyarakat multikultur dapat diterapkan dalam dunia pendidikan melalui program PPK pada satuan pendidikan?-

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menerapkan karakter utama masyarakat multikultur melalui program PPK pada satuan pendidikan adalah dengan melakukan identifikasi implementasi tiga dari lima karakter utama PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian dalam kegiatan belajar-mengajar. Selanjutnya, untuk implementasinya perlu didukung model strategi implementasi karakter utama dalam masyarakat multikultur di tingkat satuan pendidikan, baik berbasis kelas, budaya sekolah, maupun berbasis masyarakat.

Buku ini menyampaikan kebijakan mengenai model strategi implementasi pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur yang berpotensi memunculkan persoalan etnisitas dan agama secara serius. Diharapkan buku ini dapat memberikan rekomendasi untuk materi dan implementasi pendidikan karakter yang efektif dalam pembelajaran yang

didasarkan atas kondisi sosial dan budaya masyarakat yang plural serta menguatkan karakter peserta didik dalam masyarakat multikultur melalui tematik pengajaran agama dan sains. Selanjutnya, buku ini juga diharapkan menjadi model bagi pembelajaran pendidikan karakter dalam masyarakat plural dengan intensitas relasi sosial yang cenderung disharmonis di beberapa wilayah Indonesia. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi unit-unit yang terkait dengan pendidikan karakter: antara lain, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan sekolah-sekolah di daerah rawan konflik sosial dan budaya.

Lima karakter utama dalam PPK, mencakup religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Lima nilai tersebut mewakili nilai dasar terkait dengan hakikat kodrat manusia. Religiusitas merupakan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, nasionalisme dan gotong royong menunjukkan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk sosial; sedangkan kemandirian dan integritas menunjukkan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu. Untuk keperluan tulisan, buku ini akan diuraikan dengan tiga karakter utama, yaitu religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian.

Ruang lingkup spasial yang dijadikan bahan penulisan dalam buku ini diperoleh dari satuan-satuan pendidikan di wilayah masyarakat multikultur yang pernah terjadi persoalan etnisitas dan agama secara serius, yaitu pertama, persoalan yang terkait dengan etnisitas, yaitu di Kalimantan Barat (Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas). Kedua, persoalan yang terkait dengan agama, yaitu di Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Poso). Untuk keperluan penulisan ini akan diuraikan tiga dari lima karakter utama PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme dan kemandirian. dengan alasan bahwa ketiga karakter utama itu sudah mewakili hakikat kodrat dari manusia, yaitu sebagai makhluk yang bertuhan dilihat dari implementasi karakter religius sebagai makhluk sosial dapat dilihat dari karakter nasionalis dan kemandirian.

B. PERSPEKTIF ETIKA MASYARAKAT MULTIKULTUR

Di dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang “Penguatan Pendidikan Karakter” (PPK) pada satuan Pendidikan Formal” dinyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter adalah sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan yang tujuannya untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dinyatakan lebih lanjut bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan penjabaran dan merupakan perwujudan dari lima nilai utama yang saling berkaitan, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Apabila dicermati lebih lanjut nilai PPK merupakan nilai-nilai etika yang diperlukan untuk membangun karakter generasi muda. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai karakter dapat dikembangkan adalah melalui etika. Menurut ilmu filsafat, etika merupakan salah satu cabang ilmu yang mempertanyakan persoalan baik dan buruknya suatu perbuatan. Etika berbeda dengan ajaran moral yang mengacu pada ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan-kumpulan peraturan dan ketentuan-

ketetapan, baik lisan maupun tulisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik. Dikatakan lebih lanjut oleh Franz Magnis-Suseno bahwa etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Ajaran moral mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Sedangkan, etika ingin mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimanakah kita bisa mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Magnis-Suseno, 1987). Dalam penjelasan berikut akan dilihat bagaimana etika itu diterapkan dalam hubungan sosial dalam masyarakat yang plural. Dengan perkataan lain, bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat yang plural.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multietnik, multiaksara, dan multibahasa. Menurut catatan Badan Pusat Statistik terdapat sekitar 1.028 etnik yang menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerahnya masing-masing, sedangkan jumlah bahasa di Indonesia mencapai sekitar 746 bahasa (Mu'jizah, 2014).

Dalam situasi masyarakat yang plural tersebut pendidikan diperlukan sebagai proses pembentukan pribadi karena pendidikan berfungsi sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pendidikan juga mempunyai peran menyiapkan secara terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan mempunyai peran penting dalam upaya membangun karakter bangsa.

Kepribadian warga negara mampu menghargai hak-hak sosial (budaya) dan politik warga lain yang berbeda etnik, agama, dan ras atau memperkuat kepribadian yang memiliki moral kemasyarakatan (*civic virtue*) atau disebut sebagai moral kemasyarakatan dan budaya kemasyarakatan (*civic culture*) (Almond dan Verba, 1963). Kemajemukan merupakan berkah, tetapi sekaligus berpeluang menimbulkan berbagai persoalan jika tidak dikelola dengan baik. Situasi negara Indonesia yang terdiri atas beragam jenis agama

dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang menimbulkan persoalan dalam hubungan sosial. Seringkali tampak bahwa religiusitas tidak hanya dimaknai sebatas kesalehan dalam beribadah, tetapi seringkali menjadi ideologis untuk mengeksklusi dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok dengan aliran keagamaan yang berbeda (Pamungkas, 2015).

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk materi dan implementasi pendidikan karakter yang efektif dalam pembelajaran yang didasarkan atas kondisi sosial dan budaya masyarakat yang plural. Selanjutnya, juga diharapkan menjadi model bagi pembelajaran pendidikan karakter dalam masyarakat plural dengan intensitas relasi sosial yang cenderung disharmonis di beberapa wilayah Indonesia.

Beberapa informasi dan data yang disajikan dalam buku ini bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dari Puslitjak. Lokus penelitiannya yaitu pada sekolah-sekolah di wilayah yang pernah terjadi persoalan etnisitas secara serius di provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak, Kabupaten Sambas) dan provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Poso). Sementara itu, informasi dan data diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para guru di beberapa sekolah yang mengampu mata pelajaran agama, PKN, serta Seni dan Budaya; *Focus Group Discussion* (FGD); serta melakukan observasi langsung di lapangan. Di samping itu, beberapa data diperoleh melalui kuesioner daring (*online*) kepada para guru dan kepala sekolah.

Masalah yang diuraikan dalam buku ini adalah tentang implementasi karakter utama dalam masyarakat multikultur ke dalam PPK di satuan pendidikan. Karakter utama dalam masyarakat multikultur itu digali berdasarkan tiga dari lima karakter utama dalam PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian. Dalam karakter utama PPK itu sendiri secara implisit sudah terdapat nilai-nilai multikultur. Dalam penelitian ini nilai-nilai multikultur yang implisit itu lalu ungkapkan dan dijelaskan serta dilihat implementasinya dalam PPK di satuan pendidikan.

Tulisan dalam buku ini menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai

pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur itu perlu dipilih secara cermat dan seimbang. Nilai karakter itu tidak hitam putih. Nilai karakter sendiri bersifat netral dan tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Nilai-nilai pendidikan karakter itu bukan bersifat monologal yang terlepas dari konteks etika masyarakat multikultur, melainkan selalu melekat pada konteks masyarakatnya.

Tanpa acuan etika, sikap nasionalisme dapat mengarah pada ideologi yang ekstrem. Salah satu contoh adalah ultranasionalisme yang ditunjukkan oleh Nazisme yang terjadi di Jerman. Nazisme melakukan salah satunya semacam pendidikan yang dinamakan *Hitler Youth*, yakni sebuah organisasi yang dirancang oleh Adolf Hitler untuk pendidikan dan pelatihan untuk anak laki-laki di dalam menyampaikan prinsip-prinsip Nazi yang visinya mengenai ras unggul. Hasilnya adalah ultranasionalisme yang telah mengakibatkan Nazi melakukan tindak kejahatan di luar batas kemanusiaan dengan melakukan *holocaust* terhadap orang-orang Yahudi yang kekejamannya mengguncang jiwa.

Demikian pula pilihan nilai religiusitas akan menjadi dilema ketika diterapkan secara monologal yang tidak melihat konteks etika sosial dan budaya masyarakat multikultur. Nilai religiusitas yang diajarkan secara fundamental dan tekstual dapat mengakibatkan intoleransi. Pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini, terdapat beberapa fenomena kecil yang mengindikasikan sikap intoleransi terhadap masyarakat yang plural. Ada upaya dari sebagian kecil kelompok masyarakat tertentu yang berkeinginan memaksakan ideologinya secara eksklusif yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Perlu pemahaman rasionalitas terhadap religiusitas, seperti pemikiran Jurgen Habermas (lahir tahun 1929) tentang problem kekerasan fundamentalisme ideologis yang terdapat dalam karya Giovanna Borradori berjudul *Philosophy in a Time of Terror, Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*. Habermas (2007) melihat bahwa kekerasan merupakan kendala komunikasi. Dikatakannya bahwa hubungan antara

fundamentalisme dan terorisme dimediasi oleh kekerasan yang Habermas memahaminya sebagai patologi komunikasi (Borradori, 2003). Dalam pengertian ini, solusi atas terorisme tampaknya dapat diatasi dengan jalan komunikasi. Dalam komunikasi tersebut akan terjadi dialog yang rasional. Karena itu, religiusitas harus diikuti oleh nalar. Tanpa rasionalitas, akan dihasilkan teror dan kekerasan.

Seperti kondisi sosial masyarakat kita, fundamentalisme religiusitas seringkali memunculkan teror dan kekerasan. Berbagai peristiwa yang terjadi terkait dengan fundamentalisme agama seyogyanya dapat menjadi pelajaran berharga dalam pendidikan karakter, yaitu bahwa implementasi nilai religiusitas kepada peserta didik harus seimbang dengan implementasi nilai komunikasi.

Penjelasan dalam buku ini menggunakan tiga pendekatan teoritis. Pertama adalah pendekatan kesadaran moral dari Lawrence Kohlberg dan teori Jurgen Habermas tentang etika diskursus. Lawrence Kohlberg (1927-1987) adalah seorang filsuf moral dan sekaligus adalah pakar psikologi moral dari Amerika yang dikenal dengan teorinya tentang tahap-tahap perkembangan moral. Kohlberg mengembangkan teori pendidikan moral yang dikenal dengan “teori kognitif developmental”.

Berdasarkan penelitiannya, Kohlberg membuat struktur-struktur dan bentuk-bentuk umum pemikiran moral yang dapat didefinisikan secara sendiri-sendiri yang terlepas dari isi khas keputusan tindakan moral tertentu. Struktur itu berisi tiga tingkat pemikiran moral yang berbeda dan masing-masing tingkat ini dibedakan menjadi beberapa tahap yang saling berkaitan.

Tingkat pertama adalah prakonvensional, yang terdiri atas dua tahap, yakni tahap 1 adalah orientasi pada hukuman dan rasa hormat yang tidak dipersoalkan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Tahap 2 mengatakan bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain.

Tingkat kedua adalah tingkat konvensional, yang terdiri atas dua tahap, yakni tahap 3 merupakan orientasi “anak manis” berperilaku baik, yakni perilaku yang menyenangkan atau yang membantu orang lain. Tahap 4 adalah orientasi pada otoritas, peraturan yang pasti, dan pemeliharaan tata aturan sosial.

Tingkat ketiga, pascakonvensional, yang terdiri atas dua tingkat, yakni tahap 5 yang merupakan suatu orientasi kontrak sosial. Perbuatan yang benar cenderung didefinisikan dari segi hak-hak bersama dan ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh seluruh masyarakat. Tahap 6 adalah tahap orientasi pada keputusan suara hati dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri, yang mengacu pada pemahaman logis, menyeluruh, universal dan konsisten.

Teori perkembangan kesadaran Lawrence Kohlberg akan digunakan untuk mengetahui pertimbangan moral guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter nasionalisme, kemandirian, dan religiusitas dalam konteks sosial dan budaya masyarakat multikultur. Lalu, jawaban-jawaban dari guru itu ditempatkan ke dalam struktur tingkat kesadaran moral, menempati level ke berapa dari enam level kesadaran moral. Hasil pemeringkatan pilihan moral dari guru akan bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menerapkan pendidikan karakter dalam masyarakat yang plural yang lebih memadai.

Teori kedua adalah teori etika diskursus dari Jurgen Habermas. Etika diskursus merupakan prosedur yang mempersoalkan ‘apa yang adil’. Etika diskursus bukan merupakan sebuah pendasaran etika yang dapat memberikan jawaban yang siap pakai atas pertanyaan-pertanyaan moral yang diajukan, tetapi merupakan sebuah cara untuk memastikan kembalinya arti norma-norma moral yang menjadi pertanyaan (Magnis-Suseno, 2004). Etika diskursus hendak menjawab persoalan ‘apa yang adil’ karena keadilan mempunyai sifat yang universal. Etika diskursus tidak berhenti pada tahap berlakunya norma universal, tetapi keadilan perlu dijustifikasi dalam diskursus rasional di antara partisipan melalui saling pengertian untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Habermas, terdapat dua prinsip dalam etika diskursus prinsip pertama, yakni universalitas (U), yang mengatakan, “*All affected can accept the consequences and the side effect of its general observance can be anticipated to have for the satisfaction of everyone’s interest..*” (Habermas, 2007). Prinsip ini menyatakan bahwa pertimbangan moral yang saya kehendaki akan berlaku benar kalau dikehendaki oleh semua orang. Kedua yakni, prinsip diskursus (D) yang berbunyi, “*Only those norms can claim to be valid that meet (or could meet) with the approval of all affected in their capacity as participants in a practical discourse*” (Habermas, 2007). Etika diskursus tidak berhenti pada tahap (U), tetapi kebenaran universal itu didiskusikan untuk mencapai konsesus atau saling pengertian. Dengan demikian, hanya norma yang telah dipastikan dalam diskursus praktis di mana semua yang bersangkutan terlibat dapat dipastikan kebenarannya

Dalam tulisan ini teori etika diskursus Jurgen Habermas akan digunakan untuk menjembatani persoalan-persoalan yang sifatnya dilematis terhadap problem yang terkait dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang multikultur. Dalam etika diskursus itu peran dialog atau komunikasi sangat menjadi penting karena kebenaran sebuah nilai itu tidak ditentukan secara subjektif oleh pemikiran seseorang atau kelompok saja, tetapi kebenaran akan nilai itu ditemukan ketika dilakukan dalam dialog.

Ketiga, pendekatan multikulturalisme. Budaya yang beragam itu sering disebut dengan beberapa istilah, antara lain, keragaman budaya, pluralitas budaya, multikultur, dan beberapa istilah yang lain. Menurut *Ensiklopedia Encarta*, istilah multikultural mempunyai pengertian “*of more than one culture relating to, consisting of, or participating in the cultures of different countries, ethnic groups, or religions*”. Pengertian ini menggambarkan lebih dari satu budaya berhubungan atau berpartisipasi dalam budaya-budaya dari negara, kelompok etnis, atau agama yang berbeda. Dari pengertian ini tampak bahwa masyarakat multikultural berasal dari terminologi masyarakat Barat, yaitu terkait dengan masyarakat multietnis dari negara-negara yang berbeda-beda yang tinggal dalam sebuah negara.

Bhiku Parekh dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism* menggambarkan masyarakat multikultural sebagai keanekaragaman budaya dalam masyarakat modern yang mempunyai beberapa bentuk. Tiga di antaranya yang paling umum adalah **Pertama**, ia menyebutnya sebagai keanekaragaman subkultural. Dalam masyarakat ini anggotanya memiliki satu budaya umum yang luas, tetapi mereka memberikan ruang-ruang untuk gaya hidup yang berbeda. **Kedua**, keanekaragaman perspektif, yaitu mereka yang anggota masyarakatnya seringkali menentang budaya dominan. **Ketiga**, masyarakat modern yang terdiri atas beberapa macam komunitas yang kurang lebih terorganisasi dengan baik dan menjalankan hidup dengan sistem keyakinan dan praktik mereka yang berlainan (Parekh, 2008:16).

Multikulturalisme adalah sebuah paham, pemikiran atau kajian yang muncul karena respons terhadap budaya masyarakat yang plural atau multikultur. Untuk pertama kalinya multikulturalisme muncul ketika aliran liberalisme perlu dikoreksi karena meninggalkan unsur penting, yaitu tentang kebudayaan. Liberalisme merupakan pemikiran yang menekankan pentingnya kebebasan, persamaan, dan kemerdekaan individual. Menurut paham ini, peran negara menjamin kebebasan dan hak-hak individu dalam masyarakat. Aliran ini segera mendapat koreksi karena dalam menjamin hak-hak individu, mengabaikan unsur kebudayaan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KALIMANTAN BARAT

Bagian tulisan dari bab ini pertama-tama akan memaparkan sekilas mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat di Kalimantan Barat, secara khusus di wilayah penelitian, yaitu di Sambas dan Pontianak. Selanjutnya, dipaparkan analisis berdasarkan atas data-data kuantitatif mengenai tiga karakter utama dari lima karakter dalam PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian. Selanjutnya, dari data-data tersebut diberikan pula keterangan yang berasal dari data-data kualitatif hasil wawancara dengan informan.

A. KALIMANTAN BARAT YANG BERAGAM

Kalimantan Barat merupakan wilayah yang beragam sosial dan budaya. Salah satunya adalah Kota Pontianak. Berdasarkan data Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) semester II tahun 2018, jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 665.694 jiwa. Dengan komposisi 334.083 laki-laki dan 331.611 perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, tenaga kerja produktif berjumlah 467.211 jiwa. Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat yang beragama Islam menempati populasi terbanyak yaitu 502.553 jiwa, kemudian Budha dengan 88.203 jiwa, Katholik dengan 40.134 jiwa, Kristen 32.940 jiwa, Konghucu 1.679 jiwa, dan Hindu 360 jiwa. Adapun

penganut kepercayaan yang tercatat dalam Dinas Dukcapil berjumlah 5 jiwa. Oleh karena itu, Kalimantan Barat merupakan wilayah unik dengan beragam etnis.

Sementara itu, berdasarkan data BPS tahun 2018, proporsi etnis yang ada di Pontianak sebagai berikut (1) Melayu/Dayak 34.50%, (2) Tionghoa, 18.81%, (3) Bugis, 7.92%, (4) Jawa, 13.84%, (5) Madura, 11.96%, (6) Lain-lain, 12.98%.

Keragaman etnis juga terdapat di wilayah Sambas di antaranya adalah suku Melayu yang paling besar, suku Dayak, Tionghoa, Banjar, Jawa, Batak dan Minangkabau. Sementara itu, penganut agama mayoritas adalah Islam sebesar 84.82%; Buddha 8.01%; Kristen 3.56%; Katolik 3.14%; Konghucu 0.03%; dan lain-lain sejumlah 0.12%.

Beberapa kelompok etnik menempati beberapa wilayah tersendiri, misalnya, Kabupaten Sambas menjadi teritori Melayu Sambas dan Kabupaten Pontianak menjadi teritori Melayu Mempawah, Bengkayang menjadi teritori Dayak Bekati, Landak menjadi teritori Dayak Kanayatan, Sekadau menjadi teritori Dayak Mualang, Melawi menjadi teritori Dayak Keninjal dan Melayu Pinoh, serta Kayong Utara menjadi teritori Melayu Kayong.

Di kabupaten seperti Sintang Dayak Ketungau terbentuk kabupaten sendiri. Di Kabupaten Kapuas Hulu Dayak Iban, Taman, Kantu, dan Suhaid di Kabupaten Ketapang Dayak Simpang dan Dayak Keriau berdiri kabupaten baru. Di Kabupaten Sanggau Dayak Bidayuh dan Dayak Tayan mendirikan kabupaten baru.

Etnik Cina dan Madura terkonsentrasi di sekitar perkotaan. Bersama Bugis dan Jawa, keempat kelompok etnik tersebut menjadi mayoritas di beberapa lokasi kota perdagangan penting di Kalimantan Barat, seperti Kubu Raya, Pontianak, dan Singkawang. Adapun Singkawang telah menjadi teritori Cina, bukan hanya dari aspek demografis, melainkan juga simbolis.

Di Kalimantan Barat terjadi dinamika antaretnis sejak lama. Dalam relasi sosial itu seringkali terjadi konflik. Jejaknya bisa dirunut sejak tahun

1967, saat terjadi kerusuhan anti-Cina di kawasan ini. Sejak saat itu, di wilayah ini, banyak diwarnai aksi dan konflik rasial. Pemicu konflik acapkali persoalan sepele, misalnya, soal menyabit rumput di tanah orang lain (kasus 1997), perkelahian kecil (1982), soal mengganggu istri orang (1992) atau hanya karena persenggolan (1994), perebutan perempuan (1996), dan penagihan utang (1999). Namun, persoalan sepele itu kemudian meluas ke wilayah rawan hingga menimbulkan kejengkelan, khususnya antara Dayak dan Madura, dan antara Melayu dan Madura (Kristianus 2009: 33).

Konflik terakhir terjadi antara Melayu dan Madura terjadi pada Februari-April 1999 dan Oktober 2000 yang menimbulkan korban jiwa dan materi benda di kedua belah pihak yang tidak sedikit. Dampaknya bahkan sampai hari ini orang Madura belum bisa kembali ke Kabupaten Sambas.

B. KARAKTER UTAMA RELIGIUSITAS, NASIONALISME, DAN KEMANDIRIAN DI KALIMANTAN BARAT

Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, merupakan masyarakat dengan multikultur sebagaimana diuraikan di atas yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Hal itu perlu mendapat perhatian khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena sekolah merupakan tempat yang memungkinkan bertemunya berbagai etnis yang ada sekaligus melakukan interaksi satu sama lain.

Dalam rangka penguatan pendidikan karakter di sekolah, diperlukan adanya informasi tentang bagaimana implementasi nilai-nilai karakter di dalam sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Informasi yang diperlukan tersebut dapat diperoleh melalui sumber informasi dari unsur-unsur yang ada di sekolah di antaranya adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Informasi yang disajikan dalam buku ini adalah informasi berdasarkan hasil penelitian terhadap kepala sekolah dan guru-guru SMP (negeri dan swasta) yang ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas sebanyak 114 orang.

1. Implementasi Karakter Utama Religius

Karakter utama yang akan dibahas dalam sub bab ini adalah karakter religiusitas. Terdapat beberapa indikator untuk melihat bagaimana karakter religiusitas diterapkan di sekolah. Indikator-indikator religiusitas dimaksud adalah mengajarkan siswa tentang (1) cara memandang persoalan secara halal dan haram, (2) pemahaman agama secara tekstual, (3) pemahaman agama secara kontekstual, (4) perlunya agama dipraktikkan untuk kesalehan sosial, (5) sikap kritis dan rasional dalam beragama, (6) sikap komunikatif dalam beragama, (7) sikap toleransi terhadap penganut agama lain, (8) hidup rukun dan damai antarpemeluk agama lain, dan (9) menjadikan agama sebagai rahmat bagi alam semesta.

Tabel 1 berikut ini merupakan pandangan guru dan kepala sekolah dalam menerapkan karakter religiusitas untuk penguatan PPK kepada peserta didik di Kalbar.

Tabel 1 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur

BUTIR-BUTIR KUESIONER	TANGGAPAN				
	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
Mengajarkan tentang cara memandang persoalan secara halal dan haram	3,5%	5,3%	14%	46%	37%
Mengajarkan pemahaman agama secara tekstual	5,3%	-	20,2%	48,2%	26,3%
Mengajarkan pemahaman agama secara kontekstual	2,6%	1,8%	15,8%	50,9%	28,9%
Mengajarkan agama perlu dipraktikkan untuk kesalehan sosial	1,8%	0,9%	9,6%	51,8%	36%
Mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama	8,8%	7,0%	21,9%	41,2%	21,1%
Mengajarkan sikap komunikatif dalam beragama	1,8%	3,5%	14,9%	53,5%	26,3%

Mengajarkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain	-	-	4,4%	37,7%	57,9%
Mengajarkan hidup rukun dan damai antar pemeluk agama lain	-	-	3,5%	36%	39%
Mengajarkan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta	1,8%	0,9%	13,2%	46,5%	37,7%

Tabel 1 di atas menunjukkan karakter utama religiusitas di dalam sampel penelitian ini, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Keduanya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Secara khusus, sebagian besar responden (>60%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan cara memandang persoalan secara halal dan haram; secara tekstual dan kontekstual dalam pemahaman agama. Sebagian besar kepala sekolah dan guru (>60%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan bahwa agama harus dipraktikkan untuk kesalehan sosial. Sementara itu, sebagian besar responden juga (>60%) menyatakan bahwa pemahaman agama telah diajarkan secara kritis dan rasional, mengajarkan sikap komunikatif dan toleransi dalam beragama, hidup rukun dan damai antarpemeluk agama dan mengajarkan agama sebagai rahmat bagi alam semesta.

Secara detail berikut ini dijelaskan hasil analisis deskriptif statistik terhadap persoalan-persoalan yang penting dalam implementasi karakter utama religius, antara lain, tentang pemahaman agama yang tekstual, pemahaman agama yang kontekstual, kesalehan sosial, pemahaman agama yang kritis dan rasional, serta toleransi dan kerukunan.

2. Pengajaran Agama secara Tekstual

Bagian ini ingin mengetahui perbandingan antara wilayah Pontianak dan Sambas, di lokasi manakah pengajaran tekstual itu yang lebih besar di laksanakan.

Tabel 2 Pengajaran Agama secara Tekstual						
		Mengajarkan_Agama_Secara_Tekstual				Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas	6.5%	29.0%	51.6%	12.9%	Chi-Sq= 4.780; $p = .189$
	Pontianak	4.8%	16.9%	47.0%	31.3%	
Total		5.3%	20.2%	48.2%	26.3%	

Keterangan: $> 0,05$ = Tidak Signifikan

$< 0,05$ = Signifikan

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 2 di atas, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Ch-Sq = 4.78; $p = .189$) mengenai pengajaran agama secara tekstual di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Terdapat jumlah total 65% responden kepala sekolah dan guru di Kota Sambas yang menyatakan sering (52%) dan sangat sering (13%) mengajarkan agama secara tekstual, dibandingkan dengan 78% responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan hal yang sama. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Pontianak lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran agama secara tekstual telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Berkaitan dengan pengajaran agama secara tekstual, hasil analisis data kualitatif dapat dipetegas bahwa para guru mengajarkan agama secara tekstual karena terdapat kebijakan pemerintah daerah antara lain, seperti kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sambas tentang program membaca kitab suci di lingkungan kerja dan sekolah agar seluruh siswa, guru, dan tenaga pendidik membaca kitab suci 5—10 menit sebelum kegiatan proses belajar-mengajar.

3. Pengajaran Agama secara Kontekstual

Pada bagian ini ingin mengetahui perbandingan antara wilayah Pontianak dan Sambas, di lokasi manakah pengajaran kontekstual itu yang lebih dominan di laksanakan.

Tabel 3 Lokasi Penelitian * Mengajarkan Agama Secara Kontekstual							
		Mengajarkan_Agama_Secara_Kontekstual					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas			22.6%	61.3%	16.1%	Chi-Sq= 6.435; $p =$.169
	Pontianak	3.6%	2.4%	13.3%	47.0%	33.7%	
Total		2.6%	1.8%	15.8%	50.9%	28.9%	

Hasil analisis data deskriptif dengan *Cros-Tabs* yang dipresentasikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik mengenai pengajaran agama secara kontekstual (Chi-Sq = 6.435, $p = .169$). Dalam konteks ini, 81% responden kepala sekolah dan guru di Pontianak menyatakan sering (47%) dan sangat sering (44%) mengajarkan agama secara kontekstual, dibandingkan dengan 77% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (61%) dan sangat sering (16%). Dengan demikian, kendatipun persentase keseringan pengajaran agama secara kontekstual lebih tinggi di Kota Pontianak dibandingkan dengan Kabupaten Sambas, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik di Kota Pontianak maupun Kabupaten Sambas, pengajaran agama telah dilakukan secara kontekstual dengan baik, dengan melihat persentase yang tinggi di atas.

Praktik implementasi ajaran agama secara kontekstual itu juga dilaksanakan melalui kegiatan yang meningkatkan karakter peserta didik untuk peduli terhadap persoalan masyarakat. Seperti yang terlihat pada jawaban responden mengenai “Mengajarkan agama perlu dipraktikkan

untuk kesalehan sosial” di dua Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, terlihat presentase yang tinggi, yaitu yang menjawab sering sebesar 52 % dan yang menjawab sangat sering berjumlah 36 % seperti diagram berikut ini:

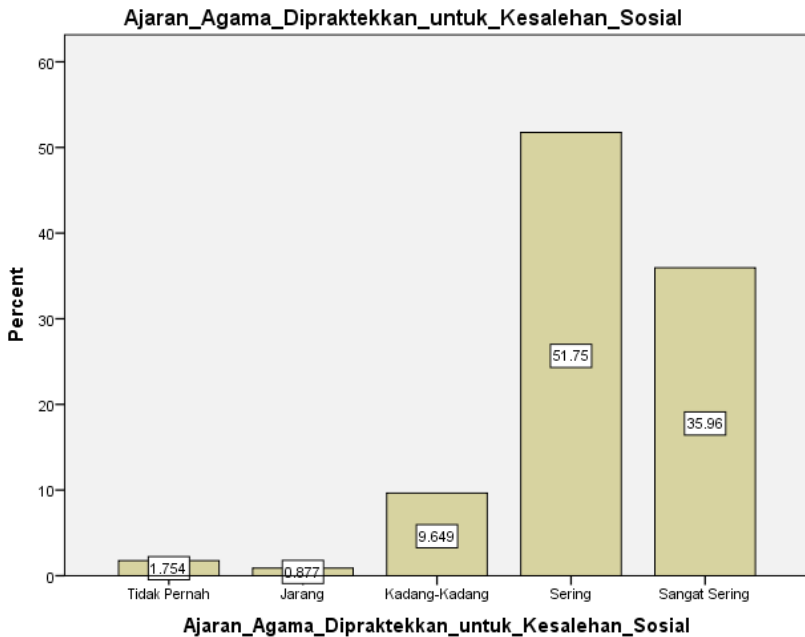


Diagram 1 Mengajarkan Agama yang Perlu Dipraktikkan untuk Kesalehan Sosial

Dalam praktiknya pemahaman agama secara kontekstual ini berdasarkan atas analisis data kualitatif dipertegas dengan informasi dari guru-guru yang mengatakan bahwa mereka mengimplementasikan melalui aktivitas di sekolah, seperti kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang diimplementasikan antara lain peduli kepada penderitaan fakir miskin dan pengumpulan sumbangan kalau ada siswa yang sakit, atau keluarga siswa yang meninggal.

Demikian pula dengan jawaban responden mengenai “Mengajarkan

agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta” yang merupakan cerminan dari pengajaran agama secara kontekstual di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, menunjukkan persentase yang tinggi, responden yang menjawab sering 47% dan yang menjawab sangat sering sebesar 38%, seperti terlihat pada diagram berikut ini.

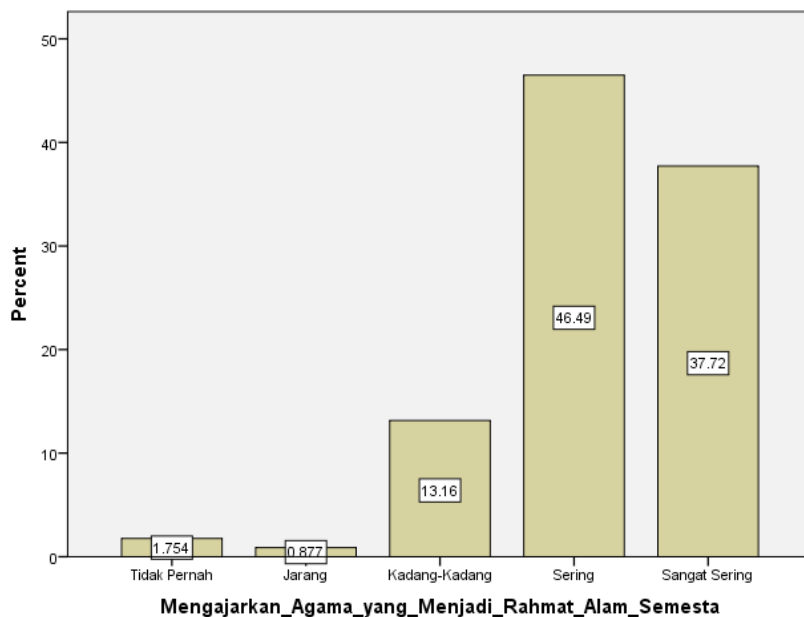


Diagram 2 Mengajarkan Agama yang Menjadi Rahmat bagi Alam Semesta

4. Sikap Kritis dan Rasionalitas dalam Religiusitas

Meskipun beberapa aspek karakter utama religiusitas sering dan bahkan sangat sering diimplementasikan oleh guru kepada siswa, para peserta didik belum melakukan implementasi secara optimal terhadap pandangan yang kritis dan rasional terhadap religiusitas, seperti pada diagram berikut.

Tabel 4 Mengajarkan Sikap Kritis dan Rasional dalam Beragama

		Mengajarkan_Sikap_Kritis_dan_Rasional_dalam_Beragama					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas	6.5%	6.5%	32.3%	41.9%	12.9%	Chi-Sq= 3.700; $p = .448$
	Pontianak	9.6%	7.2%	18.1%	41.0%	24.1%	
Total		8.8%	7.0%	21.9%	41.2%	21.1%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 4 di atas, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\text{Chi-Sq} = 3.700$; $p = .448$) mengenai mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Terdapat jumlah total 55% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (42%) dan sangat sering (13%) mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama, dibandingkan dengan 65 % responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan hal yang sama. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Pontianak lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap kritis dan rasional telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Meskipun responden yang menjawab sering dan sangat sering 55% di Kabupaten Sambas dan yang menjawab sering dan sangat sering 65% di Kota Pontianak, terdapat responden di Kabupaten Sambas yang menjawab 6,5% tidak pernah; 6,5% menjawab jarang dan 32% menjawab kadang-kadang. Sementara itu, di Pontianak diketahui yang menjawab tidak pernah 7%, yang menjawab jarang 7%, dan yang menjawab kadang-kadang 18%. Hal itu berarti bahwa sikap kritis dan rasional belum menjadi karakter utama dalam pengajaran PPK di kedua wilayah tersebut karena masih terdapat guru yang

tidak pernah dan jarang mengajarkan sikap rasional dan kritis terhadap religiusitas.

Sikap rasional dalam beragama itu juga sekaligus mengandaikan adanya sikap komunikatif, yaitu sikap yang terbuka terhadap pemeluk agama lain dengan melakukan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan religiusitas, baik terhadap perdedaan pendapat dalam satu agama maupun di luar agama. Sikap komunikatif itu telah diimplementasikan dalam PPK di Sambas dan Pontianak, misalnya, guru melarang untuk bersikap eksklusif terhadap pemeluk agama lain.

Tabel 5 Mengajarkan Sikap Komunikatif dalam_Agama							
		Mengajarkan_Sikap_Komunikatif_dalam_Agama					Total
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas			25.8%	41.9%	32.3%	100.0%
	Pontianak	2.4%	4.8%	10.8%	57.8%	24.1%	100.0%
Total		1.8%	3.5%	14.9%	53.5%	26.3%	100.0%

Tabel 5 menunjukkan bahwa para pendidik di Kota Pontianak cenderung lebih besar mengimplementasikan sikap komunikatif itu ke dalam PPK, yaitu sebesar 58% menjawab sering dan 24% menjawab sangat sering sehingga jumlah total adalah 82%. Angka itu cukup besar, sedangkan di Kabupaten Sambas berjumlah 42 % menjawab sering dan 32% menjawab sangat sering sehingga kalau ditotal berjumlah 74 %. Sikap komunikatif yang tinggi ini menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut terdapat hubungan yang baik antarpemeluk agama yang berbeda-beda.

5. Mengajarkan Toleransi Antarumat Beragama

Dalam kaitannya dengan sikap komunikatif, nilai toleransi menjadi penting, yaitu sikap toleran, yang menunjukkan hubungan kelompok kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah agama dan kepercayaan untuk

saling memahami satu sama lain. Implementasi sikap toleransi ke dalam PPK di wilayah Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak sangat tinggi, yaitu 38% menjawab sering dan 58% menjawab sangat sering. Kalau ditotal, jumlahnya 96%, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Bahkan tidak ada seorang guru atau kepala sekolah yang menjawab tidak pernah dan jarang. Hal itu berarti bahwa mereka sangat intensif mengajarkan toleransi kepada peserta didik.

Demikian pula dengan para guru dan kepala sekolah, yang mengajarkan hidup rukun dan damai antar pemeluk agama di kedua wilayah penelitian Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak, sangat intensif menyampaikan kepada peserta didik, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Para guru dan kepala sekolah tidak ada yang menjawab tidak pernah dan jarang. Karena itu, mereka sangat intensif menyampaikan sikap rukun dan damai antarumat beragama, seperti yang ditunjukkan Tabel 1, yang menjawab sering 36% dan yang menjawab sangat sering 60,5%. Kalau ditotal, jumlahnya 96,5%, hanya 3,5% saja yang menjawab kadang-kadang.

6. Implementasi Karakter Nasionalisme

Selain karakter religiusitas sebagaimana telah diuraikan di atas, karakter nasional merupakan salah satu karakter utama dalam pengembangan PPK di satuan pendidikan. Pembinaan dan peningkatan sikap yang menunjukkan bahwa karakter nasionalisme kepada peserta didik sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap sesama anak bangsa dan sekaligus belajar mencintai tanah airnya sendiri.

Dalam subbab ini akan diuraikan indikator-indikator apa saja yang menjadi ukuran dari pembinaan karakter nasionalisme di satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan yang memiliki masyarakat multikultur ciri dari pembinaan karakter nasionalisme, yaitu mengajarkan (1) kesetiaan kepedulian dan penghargaan budaya bangsa; (2) sikap rela berkorban; (3) sikap cinta damai; (4) sikap cinta tanah air; (5) sikap menjaga lingkungan; (6) mengajarkan sikap taat hukum; (7) sikap menghargai keragaman; dan (8) sikap komunikatif antarkelompok yang beragam.

Berikut adalah hasil survei karakter utama nasionalisme yang diperoleh melalui kuesioner di sekolah-sekolah Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas.

Tabel 6 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur

BUTIR-BUTIR KUESIONER	TANGGAPAN (%)				
	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
Mengajarkan kesetiaan kepedulian dan penghargaan budaya bangsa	-	3,5	11,4	30,7	54,4
Mengajarkan Sikap Rela Berkorban	-	3,5	11,4	29,8	55,3
Mengajarkan Sikap Cinta Damai	-	3,5	7,9	26,3	62,2
Mengajarkan Sikap Cinta Tanah Air	.9	2,6	10,5	36,8	49,1
Mengajarkan Sikap Menjaga Lingkungan	-	2,6	13,2	33,3	50,9
Mengajarkan Sikap Taat Hukum	-	3,5	14	35,1	47,4
Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman	-	.9	6,1	29,8	63,2
Mengajarkan Sikap Komunikatif Antarkelompok yang Beragam	.9	.9	21,1	33,3	43,9

Tabel 6 di atas menunjukkan karakter utama nasionalisme di dalam sampel penelitian ini, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, keduanya di Provinsi Kalimantan Barat. Secara khusus, sebagian besar responden (>70%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan kepada anak bangsa; sikap menghargai keragaman; dan mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam. Sebagian besar kepala sekolah dan guru (>70%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan sikap rela berkorban dan sikap menjaga lingkungan. Sementara itu, sebagian besar responden juga (>70%) menyatakan mengajarkan sikap cinta damai; mengajarkan sikap cinta tanah air mengajarkan sikap taat hukum.

Secara detail berikut ini dijelaskan hasil analisis deskriptif statistik terhadap persoalan-persoalan yang penting dalam implementasi karakter utama nasionalisme, antara lain, sikap menghargai keragaman; cinta tanah air; sikap taat terhadap hukum.

a. Mengajarkan Sikap Cinta kepada Tanah Air.

Nasionalisme merupakan sikap cinta kepada tanah air. Pada bagian ini ingin membandingkan sikap cinta kepada tanah air di dua wilayah penelitian Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas.

Tabel 7 Mengajarkan Sikap Cinta Tanah Air							
		Mengajarkan_Sikap_Cinta_Tanah_Air					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas		3.2%	6.5%	38.7%	51.6%	Chi-Sq= 1.196; $p =$.879
	Pontianak	1.2%	2.4%	12.0%	36.1%	48.2%	
Total		0.9%	2.6%	10.5%	36.8%	49.1%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 7 di atas, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\text{Ch-Sq} = 1.196; p = .879$) mengenai 'mengajarkan sikap cinta tanah air' di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Terdapat jumlah total 91% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (39%) dan sangat sering (52%) mengajarkan sikap cinta tanah air kepada siswa, dibandingkan dengan 84% responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan sering 36% dan sangat sering 48%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kabupaten Sambas lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran

sikap cinta tanah air telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Berkaitan dengan pengajaran sikap cinta terhadap tanah air, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas bahwa para guru mengajarkan sikap cinta kepada tanah air melalui aktivitas, seperti melakukan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan dan Indonesia Raya, dan menghafal lima sila dari Pancasila.

Demikian pula sikap untuk rela berkorban demi tanah air. Berdasarkan atas Tabel 7 di atas, responden guru dan kepala sekolah yang menjawab sering 30% dan sangat sering 55% sehingga kalau ditotal jumlahnya 85 %, Hasil analisis data kualitatif implementasi sikap rela berkorban itu dapat dilihat dari kegiatan untuk mengumpulkan dana ketika terjadi musibah bencana alam di wilayah Indonesia, sebagai bentuk dari sikap rela berkorban kepada bangsa dan negara.

Dalam kaitannya dengan cinta terhadap tanah air itu, sikap cinta damai sangat diperlukan dalam membangun rasa nasionalisme. Sikap cinta damai itu seperti ditunjukkan dalam Tabel 7 yang menunjukkan jawaban sering dari guru dan kepala sekolah sebesar 26% dan yang menjawab sangat sering 62%.

b. Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman

Nasionalisme dapat dibangun dengan baik jika antarwarganya menghargai keberagaman. Tabel 7 menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah sangat intens untuk mengajarkan tentang menghargai keberagaman, seperti yang terlihat dari prosentase yang menjawab sering 30% dan menjawab sangat sering 63%, total semuanya berjumlah 93%.

Penghargaan terhadap keragamam itu dapat terwujud melalui adanya komunikasi yang baik antarkelompok masyarakat yang beragam. Berikut ini adalah intensitas guru dan kepala sekolah dalam mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam kepada peserta didik di dua wilayah penelitian Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas.

Tabel 8 Mengajarkan Sikap Komunikatif Antarkelompok yang Beragam							
		Mengajarkan_Sikap_Komunikatif_Antar_Kelompok_yang_Beragam					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas		3.2%	19.4%	35.5%	41.9%	
	Pontianak	1.2%		21.7%	32.5%	44.6%	Chi-Sq= 3.204; $p = .524$
Total		0.9%	0.9%	21.1%	33.3%	43.9%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 8, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Chi-Sq= 3.204; $p = .524$) mengenai ‘mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam’ di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Terdapat jumlah total 78% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (36%) dan sangat sering (42%) mengajarkan sikap komunikatif kepada siswa dibandingkan dengan 77 % responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan sering 33% dan sangat sering 45%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kabupaten Sambas lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap komunikatif antara kelompok yang beragam telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

c. Mengajarkan Sikap Taat kepada Hukum

Sikap taat terhadap hukum merupakan salah satu sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme. Hukum dibangun atas kebersamaan, orang yang cinta terhadap tanah air adalah orang yang bersikap taat terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Tabel 9 menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah sangat intens untuk mengajarkan sikap taat terhadap hukum, seperti yang terlihat dari prosentase yang menjawab sering 35%

dan menjawab sangat sering 47%, yang totalnya berjumlah 93%.

Berikut ini adalah intensitas guru dan kepala sekolah dalam mengajarkan sikap taat kepada hukum kepada peserta didik di wilayah penelitian Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas.

Tabel 9 Mengajarkan Sikap Taat_Hukum						
		Mengajarkan_Sikap_Taat_Hukum				Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas	3.2%	9.7%	32.3%	54.8%	Chi-Sq= 1.185; $p = .757$
	Pontianak	3.6%	15.7%	36.1%	44.6%	
Total		3.5%	14.0%	35.1%	47.4%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 9, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Chi-Sq= 1.185; $p = .757$) mengenai 'mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam' di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Terdapat jumlah total 89% responden kepala sekolah dan guru di Kota Sambas yang menyatakan sering (32%) dan sangat sering (55%) mengajarkan sikap taat hukum kepada siswa, dibandingkan dengan 81 % responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan sering 36% dan sangat sering 45%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Sambas lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap taat terhadap hukum telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Berkaitan dengan pengajaran sikap taat terhadap hukum, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas bahwa para guru mengimplementasikan sikap taat hukum melalui kebiasaan-kebiasaan sekolah seperti mematuhi tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah dan mematuhi aturan-aturan kelas yang telah disepakati bersama.

Upaya untuk mematuhi tata tertib sekolah ini tercermin dari sikap

menjaga lingkungan sekolah, seperti menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman-tanaman, dan menjaga kebersihan sekolah. Diagram berikut ini menunjukkan jawaban guru dan kepala sekolah yang telah mengajarkan sikap untuk menjaga lingkungan kepada peserta didik, yang menjawab sering 33% yang menjawab sangat sering 51%, jika dijumlah keduanya sebesar 84%.

7. Implementasi Karakter Kemandirian

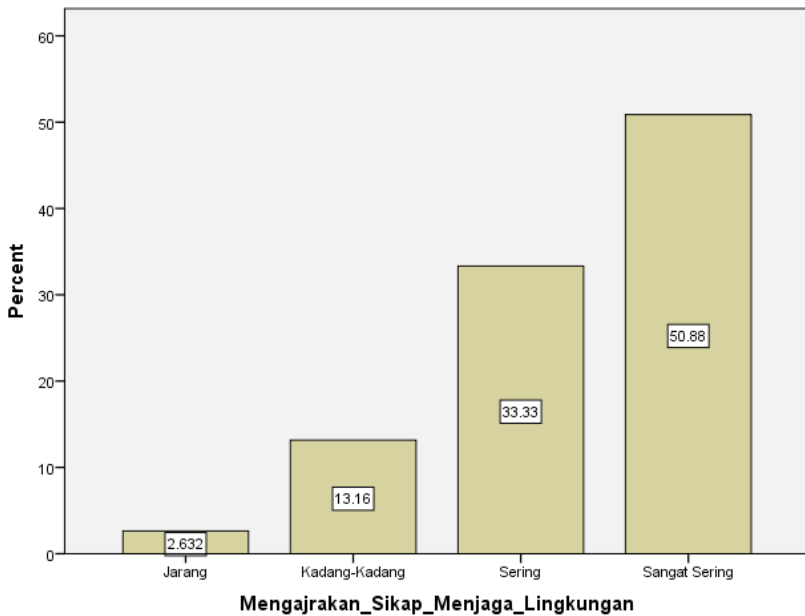


Diagram 3 Mengajarkan Sikap Menjaga Lingkungan

Untuk mengukur karakter kemandirian dalam penguatan pendidikan karakter di satuan Pendidikan di Kalimantan Barat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasinya. Indikator-indikator dimaksud adalah: 1) mengajarkan sikap sportif; 2) mengajarkan sikap demokratis; 3) mengajarkan sikap komunikatif; 4) mengajarkan

menjauhkan sikap etnosentrisme; dan 5) mengajarkan menjauhkan sikap egoisme individualisme.

Berikut adalah hasil survey implementasi karakter kemandirian di Kalimantan Barat.

Tabel 10 Karakter Utama Kemandirian dalam Masyarakat Multikultur

BUTIR-BUTIR KUESIONER	TANGGAPAN				
	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
Mengajarkan Sikap Sportif	-	9	10,5	35,1	53,5
Mengajarkan Sikap Demokratis	1,8	2,6	15,8	34,2	45,6
Mengajarkan Sikap Komunikatif	-	9	20,2	36	43
Mengajarkan Menjauhkan Sikap Etnosentrisme	7,9	3,5	20,2	23,7	44,7
Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme	4,4	1,8	13,2	33,3	47,4

Tabel 10 menunjukkan karakter utama Kemandirian di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, keduanya di Provinsi Kalimantan Barat. Secara khusus, sebagian besar responden (>60%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan sikap sportif; sikap demokratis; dan sikap komunikatif untuk membentuk sikap pribadi yang penting dalam masyarakat multikultur. Sebagian besar kepala sekolah dan guru (>60%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan menjauhkan sikap etnosentrisme dan menjauhkan sikap egoisme/individualisme. Secara detail berikut ini dijelaskan mengenai hasil analisis deskriptif statistik terhadap persoalan-persoalan yang penting dalam implementasi karakter utama kemandirian.

a. Mengajarkan Sikap Demokratis

Sikap demokratis sangat diperlukan dalam masyarakat yang beragam,

yang terkandung di dalamnya nilai kemandirian bagi siswa. Dalam sikap demokratis mengandung sikap untuk berani mengungkapkan pendapat, serta kemampuan untuk menerima keputusan orang banyak. Berikut ini adalah intensitas guru dan kepala sekolah dalam mengajarkan sikap demokratis kepada peserta didik di wilayah penelitian Kota Pontianak dan kabupaten Sambas.

Tabel 11 Mengajarkan Sikap Demokratis

		Mengajarkan_Sikap_Demokratis					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas	3.2%	3.2%	9.7%	29.0%	54.8%	Chi-Sq= 1.185; $p =$.757
	Pontianak	1.2%	2.4%	18.1%	36.1%	42.2%	
Total		1.8%	2.6%	15.8%	34.2%	45.6%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 11, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Chi-Sq= 1.185; $p = .757$) mengenai ‘mengajarkan sikap demokratis’. Terdapat jumlah total 84% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (29%) dan sangat sering (55%) mengajarkan sikap demokratis, dibandingkan dengan 78% responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan sering 36% dan sangat sering 42%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kabupaten Sambas lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap demokratis telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Berkaitan dengan pengajaran sikap demokratis, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas bahwa para guru mengimplementasikan sikap

demokratis ini seperti dalam pemilihan ketua dan wakil kelas, dan pemilihan wakil dan ketua OSIS.

Dalam demokrasi terkandung sikap komunikatif, dari diagram berikut ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah telah mengajarkan sikap komunikatif ini kepada peserta didik, responden yang menjawab sering 36%, yang menjawab sangat sering sebanyak 43%.

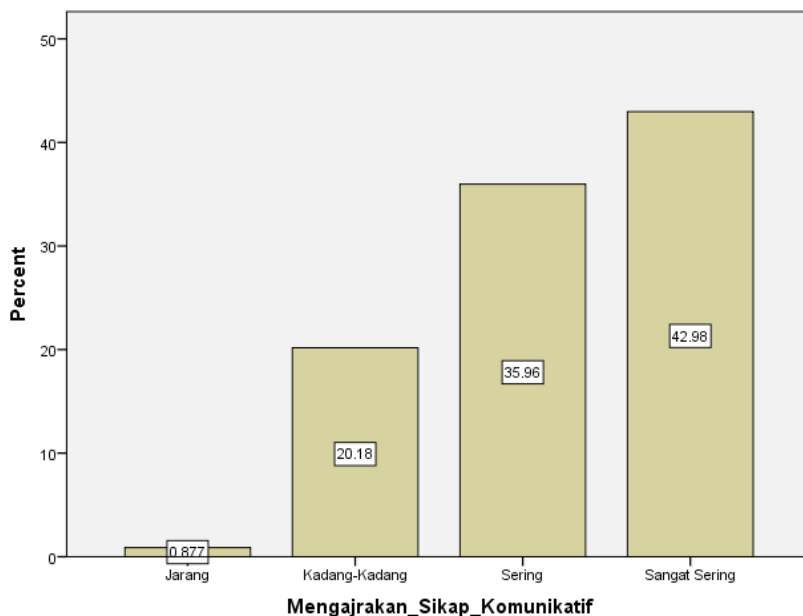


Diagram 4 Mengajarkan Sikap Komunikatif Membangun Kepribadian

Dalam demokrasi perlu bersikap sportif yaitu kemampuan untuk dapat menerima kemenangan dan kekalahan secara elegan. Berdasarkan atas data kuantitatif dapat dilihat bahwa guru dan kepala sekolah telah mengajarkan sikap sportif kepada peserta didik. Diagram 5 memperlihatkan responden yang menjawab sering 35%, yang menjawab sangat sering 54%.

b. Menjauhkan Sikap Individualisme/Egoisme

Sikap individualism dan egoisme merupakan sikap yang mementingkan diri sendiri, ukuran kebenaran diukur dari kebenaran sendiri. Sikap individualisme dan egoisme perlu dihindari dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang plural. Berikut ini adalah pengajaran guru dan kepala sekolah untuk menjauhkan sikap individualisme/egosentrisme dalam masyarakat multikultur di wilayah penelitian Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak.

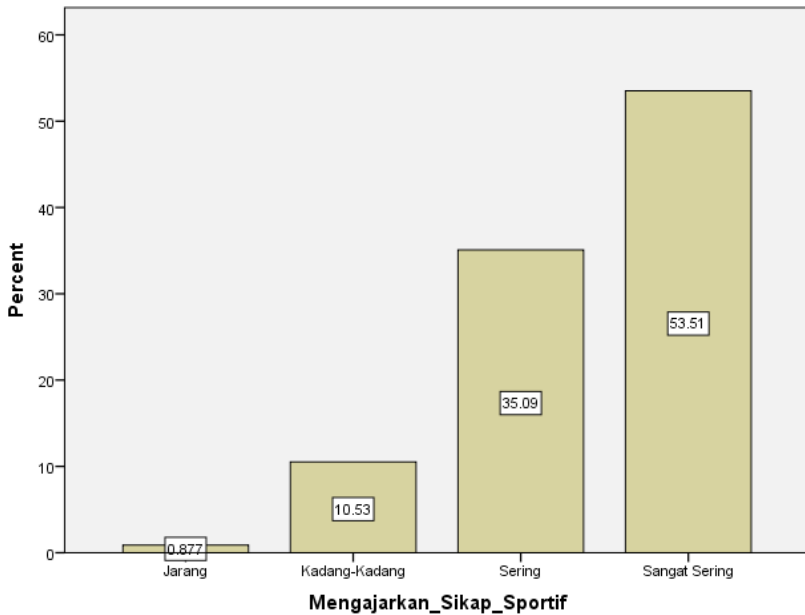


Diagram 5 Mengajarkan Sikap Sportif

Tabel 12 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme							
		Mengajarkan_Menjauhkan_Sikap_Egoisme_Individualisme					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas	6.5%	3.2%	9.7%	38.7%	41.9%	Chi-Sq= 1.966; $p = .742$
	Pontianak	3.6%	1.2%	14.5%	31.3%	49.4%	
Total		4.4%	1.8%	13.2%	33.3%	47.4%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 12, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Chi-Sq= 1.966; $p = .742$) mengenai guru dan kepala sekolah 'mengajarkan menjauhkan sikap individualisme/egoisme. Terdapat jumlah total 81% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (39%) dan sangat sering (42%) mengajarkan agar menjauhkan sikap individualis/egoisme dalam masyarakat multikultur, dibandingkan dengan 80% responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan sering 31% dan sangat sering 49% mengajarkan hal yang sama. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kabupaten Sambas lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu dapat dijelaskan bahwa pengajaran menjauhkan sikap individualisme/egoisme dalam masyarakat multikultur telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

c. Menjauhkan Sikap Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah sikap yang mendasarkan diri kepada kebenaran dari nilai dan budaya sendiri. Dalam masyarakat multikultur sikap etnosentrisme perlu dihindarkan. Berikut ini adalah pengajaran guru dan kepala sekolah untuk menjauhkan sikap etnosentrisme dalam masyarakat multikultur di wilayah penelitian Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak.

Tabel 13 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Etnosentrisme							
		Mengajarkan_Menjauhkan_Sikap_Etnosentrisme					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Sambas	6.5%	6.5%	12.9%	25.8%	48.4%	Chi-Sq= 2.487; $p = .647$
	Pontianak	8.4%	2.4%	22.9%	22.9%	43.4%	
Total		7.9%	3.5%	20.2%	23.7%	44.7%	

Tabel 13 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\text{Chi-Sq} = 2.487; p = .647$) mengenai guru dan kepala sekolah 'mengajarkan menjauhkan sikap etnosentrisme'. Terdapat jumlah total 74% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sambas yang menyatakan sering (26%) dan sangat sering (48%) mengajarkan agar menjauhkan sikap etnosentrisme dalam masyarakat multikultur, dibandingkan dengan 66% responden kepala sekolah dan guru di Kota Pontianak yang menyatakan sering 23% dan sangat sering 43%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kabupaten Sambas lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran menjauhkan sikap etnosentrisme dalam masyarakat multikultur telah dilakukan di kedua lokasi tersebut. Meskipun demikian, terlihat bahwa masih terdapat responden yang menjawab kurang intens mengajarkan untuk menjauhkan sikap etnosentrisme, seperti jawaban responden di Kabupaten Sambas yang mengatakan tidak pernah sebesar 6,5%, yang menjawab jarang 6,5% dan yang menjawab kadang-kadang sebesar 13%. Untuk di Kota Pontianak yang menjawab pernah sebesar 8%, yang menjawab jarang 2%, dan yang menjawab kadang-kadang sebesar 23%.

BAB III

IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SULAWESI TENGAH

Bagian tulisan ini pertama-tama akan memaparkan sekilas kondisi sosial dan budaya masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah penelitian, yaitu di Kota Palu dan Kabupaten Poso. Selanjutnya, dipaparkan analisis berdasarkan data-data kuantitatif mengenai tiga karakter utama dari lima karakter dalam PPK yang dipilih, yaitu religius, nasionalisme dan kemandirian. Selanjutnya, dari data-data tersebut diberikan pula keterangan yang berasal dari data-data kualitatif hasil wawancara dengan informan.

A. SULAWESI TENGAH YANG BERAGAM

Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang beragam sosial dan budayanya. Berdasarkan data BPS Kota Palu, penduduk Sulawesi Tengah pada 2016 berjumlah 29.217.000 jiwa. Penduduk Kota Palu sendiri sebesar 374.000 jiwa, sedangkan *update* data terbaru menurut BPS, penduduk Kabupaten Poso berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 256.393 jiwa yang terdiri atas 132.592 jiwa penduduk laki-laki dan 123.801 jiwa penduduk perempuan.

Berdasarkan komposisi agama di Kota Palu pada tahun 2015 mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sebesar 84,06 %; Protestan sebesar 8.16%;

Katolik sebesar 2.23%; Hindu sebesar 2 %, dan Buddha 3.55 %. Sementara itu, komposisi agama di Kabupaten Poso mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan sebanyak 89.585 jiwa, sedangkan penduduk yang beragama Islam sebanyak 83.361 jiwa, Kristen Katolik 2.894 jiwa, Hindhu 13.033, dan Bhuddha sabanyak 4 jiwa.

Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 820 rumah ibadah di Kabupaten Poso. Ada 176 masjid, 73 musala, 455 gereja Protestan, 19 gereja Katolik, dan 97 pura. Masjid terbanyak ada di Kecamatan Poso Pesisir ,yaitu sebanyak 35 buah, gereja Protestan terbanyak ada di Kecamatan Pamona Pusalemba, yaitu sebanyak 62 buah, dan pura terbanyak ada di Kecamatan Pamona Barat, yaitu sebanyak 28 buah.

Sulawesi Tengah terdiri dari beragam suku bangsa. Berdasarkan data dari Direktorat Nilai Budaya dan Tradisi, Direktorat Kebudayaan, tercatat kurang lebih terdapat sebanyak lima belas suku bangsa tersebar di seluruh Sulawesi Tengah, yaitu suku Banggai, Seasea, Salua, Balantak, Pamona, Lore, Bada, Bungku, Mori, Kulawi, Kaili, Lauje, Tialo, Toli-Toli, dan suku Buol.

Sulawesi Tengah yang beragam dalam dinamika sosial antarwarganya sekarang menunjukkan kehidupan yang harmoni di antara warganya. Mereka hidup berdampingan dan saling menjaga kerukunan. Namun, pada masa lalu terdapat dinamika konflik yang cukup tajam sehingga menimbulkan duka dengan hilangnya ratusan nyawa dari warganya yang saling bertikai antara dua kubu Islam dan Kristen.

Tercatat ada tiga gelombang kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso. Gelombang pertama bersamaan dengan maraknya unjuk rasa dan kekerasan di seluruh Indonesia pascakeruntuhan Orde Baru pada tahun 1998. Gelombang kedua, terjadi pada tahun 2000 setelah lebih satu tahun mengalami ketenangan, gejolak politik dan hukum lokal menimbulkan ketegangan. Gelombang ketiga adalah konflik yang paling parah dan meluas yang terjadi yaitu sekitar bulan Mei 2000.

Pengalaman yang memilukan ini telah menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Kabupaten Poso untuk tidak mengulang lagi konflik yang

mengorbankan ratusan nyawa dan banyak harta benda. Beberapa upaya telah dilaksanakan, antara lain, dalam dunia pendidikan yakni melakukan pendidikan harmoni untuk menginternalisasi nilai-nilai solidaritas dan kerukunan kepada peserta didik.

B. KARAKTER UTAMA RELIGIUS, NASIONALISME, DAN KEMANDIRIAN DI SULAWESI TENGAH

Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Poso, merupakan masyarakat multikultur. Hal itu perlu mendapat perhatian khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena sekolah merupakan tempat yang memungkinkan bertemunya berbagai kelompok masyarakat yang plural, yang melakukan interaksi satu sama lain.

Dalam rangka penguatan pendidikan karakter di sekolah, diperlukan adanya informasi tentang bagaimana implementasi nilai-nilai karakter di dalam sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Informasi yang diperlukan tersebut diperoleh melalui sumber informasi dari unsur-unsur yang ada di sekolah di antaranya adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Informasi yang disajikan dalam buku ini adalah informasi berdasarkan hasil penelitian terhadap kepala sekolah dan guru-guru SMP (negeri dan swasta) yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Poso yang berjumlah 75 orang.

1. Implementasi Karakter Religius

Karakter utama yang akan dibahas dalam bab ini adalah karakter religiusitas. Terdapat beberapa indikator untuk melihat bagaimana karakter religiusitas diterapkan di sekolah. Indikator-indikator religiusitas yang digunakan sama seperti yang digunakan untuk survei di Kalimantan Barat, yang dimaksud adalah mengajarkan siswa hal-hal yang terkait dengan (1) cara memandang persoalan secara halal dan haram; (2) pemahaman agama secara tekstual; (3) pemahaman agama secara kontekstual; (4) perlunya agama dipraktikkan untuk kesalehan sosial; (5) sikap kritis dan rasional dalam beragama; (6) sikap komunikatif dalam beragama; (7) sikap toleransi

terhadap penganut agama lain; (8) hidup rukun dan damai antarpemeluk agama lain; dan (9) agama sebagai rahmat bagi alam semesta.

Tabel 14 berikut ini merupakan perspektif guru dan kepala sekolah dalam menerapkan karakter religiusitas untuk penguatan PPK kepada peserta didik dalam masyarakat yang multikultur di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Poso.

Tabel 14 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur di Wilayah Kota Palu dan Kabupaten Poso

BUTIR-BUTIR KUESIONER	TANGGAPAN				
	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
Mengajarkan tentang cara memandang persoalan secara halal dan haram	8	1,3	9,3	52	29,3
Mengajarkan pemahaman agama secara tekstual	5,3	8	13,3	49,3	24
Mengajarkan pemahaman agama secara kontekstual	4	2,7	14,7	48	30,7
Mengajarkan agama perlu dipraktikkan untuk kesalehan sosial	-	2,7	9,3	45,3	42,7
Mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama	8	2,7	20	46,7	22,7
Mengajarkan sikap komunikatif dalam beragama	1,3	2,7	6,7	62,7	26,7
Mengajarkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain	-	-	2,7	28	69,3
Mengajarkan hidup rukun dan damai antar pemeluk agama lain	-	-	1,3	28	70,7
Mengajarkan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta	1,3	1,3	10,7	34,7	52

Tabel 14 menunjukkan karakter utama religiusitas di dalam sampel penelitian ini, yaitu Kota Palu dan Kabupaten/Kota sekitarnya dan Kabupaten Poso. Keduanya ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara khusus, sebagian besar responden (>50%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan cara memandang persoalan secara halal dan haram serta secara tekstual dan kontekstual dalam pemahaman agama. Sebagian besar kepala sekolah dan guru (>50%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan bahwa agama harus dipraktikkan untuk kesalehan sosial. Sementara itu, sebagian besar responden (>50%) menyatakan bahwa pemahaman agama telah diajarkan secara kritis dan rasional, guru juga telah mengajarkan sikap komunikatif dan toleransi dalam beragama, hidup rukun dan damai antarpemeluk agama, dan mengajarkan agama sebagai rahmat bagi alam semesta.

Secara detail berikut ini dijelaskan mengenai hasil analisis deskriptif statistik terhadap persoalan-persoalan penting dalam implementasi karakter utama religius, antara lain, tentang pemahaman agama yang tekstual, pemahaman agama yang kontekstual, kesalehan sosial, pemahaman agama yang kritis dan rasional, serta toleransi dan kerukunan.

a. Pengajaran Agama Secara Tekstual

Bagian ini ingin mengetahui perbandingan antara Kota Palu dan Kabupaten/Kota sekitarnya dan Kabupaten Poso, di lokasi manakah pengajaran tekstual itu yang lebih besar dilaksanakan.

Tabel 15 Mengajarkan_Agama_secara_Tekstual Tabulasi Silang (<i>Crosstabulation</i>)							
		Mengajarkan_Agama_secara_Tekstual					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		4.5%	13.6%	45.5%	36.4%	Chi-Sq= 4.205; $p = .379$
	Poso	7.5%	9.4%	13.2%	50.9%	18.9%	
Total		5.3%	8.0%	13.3%	49.3%	24.0%	

> 0,05 = Tidak Signifikan; < 0,05 = Signifikan

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan pada Tabel 15, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\chi^2 = 4.205$; $p = .379$) mengenai pengajaran agama secara tekstual di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dengan Kabupaten Poso. Terdapat jumlah total 81% responden kepala sekolah dan guru di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya yang menyatakan sering (46%) dan sangat sering (36%) mengajarkan agama secara tekstual dibandingkan dengan 73% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan hal yang sama. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Palu dan sekitarnya lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, tetapi tidak signifikan secara statistik. Karena itu dapat dijelaskan bahwa pengajaran agama secara tekstual telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

b. Pengajaran Agama secara Kontekstual

Pada bagian ini akan diketahui perbandingan antara wilayah Kota Palu dan sekitarnya dan Kabupaten Poso, di lokasi manakah pengajaran kontekstual itu yang lebih dominan di laksanakan.

Tabel 16 Mengajarkan Agama secara Kontekstual							
		Mengajarkan_Agama_secara_Kontekstual					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		4.5%	4.5%	54.5%	36.4%	$\chi^2 = 4.439$; $p = .350$
	Poso	5.7%	1.9%	18.9%	45.3%	28.3%	
Total		4.0%	2.7%	14.7%	48.0%	30.7%	

Hasil analisis data deskriptif dengan tabulasi silang (*cros-tabs*) yang dipresentasikan dalam Tabel 16 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik mengenai pengajaran agama secara kontekstual ($\chi^2 = 4.439$; $p = .350$). Dalam konteks ini, 91%

responden kepala sekolah dan guru di Kota Palu dan sekitarnya menyatakan sering (55%) dan sangat sering (36%) mengajarkan agama secara kontekstual, dibandingkan dengan 74% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering (45%) dan sangat sering (28%). Dengan demikian, kendatipun persentase intensitas pengajaran agama secara kontekstual di Kota Palu dan sekitarnya lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Poso, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik di Kota Palu dan sekitarnya maupun Kabupaten Poso, pengajaran agama telah dilakukan secara kontekstual dengan baik dengan melihat persentase yang tinggi pada Tabel 16.

Praktik implementasi ajaran agama secara kontekstual itu juga dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan karakter peserta didik untuk peduli terhadap persoalan masyarakat. Seperti yang terlihat pada jawaban responden mengenai “mengajarkan agama perlu dipraktikkan untuk kesalehan sosial” baik di Kota Palu dan sekitarnya maupun Kabupaten Poso yang menunjukkan presentase yang tinggi, yaitu yang menjawab sering sebesar 45 % dan yang menjawab sangat sering berjumlah 43 % seperti diagram berikut ini:

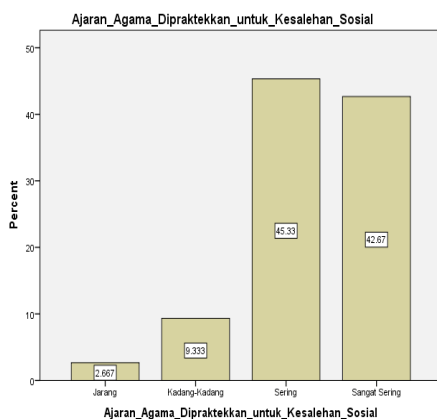


Diagram 6 Mengajarkan Agama yang Perlu Dipraktikkan
untuk Kesalehan Sosial

Dalam praktiknya pemahaman agama secara kontekstual ini berdasarkan atas analisis data kualitatif dipertegas dengan guru-guru mengatakan bahwa mereka mengimplementasikan melalui aktivitas-aktivitas di sekolah, berupa kegiatan kepedulian sosial, seperti peduli kepada penderitaan fakir miskin, pengumpulan sumbangan kalau ada siswa yang sakit, atau keluarganya meninggal.

Demikian pula dengan jawaban responden mengenai “mengajarkan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta” yang merupakan cerminan dari pengajaran agama secara kontekstual di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso. Hasilnya menunjukkan persentase yang tinggi, responden yang menjawab sering 35% dan yang menjawab sangat sering sebesar 52%, seperti terlihat pada diagram 7.

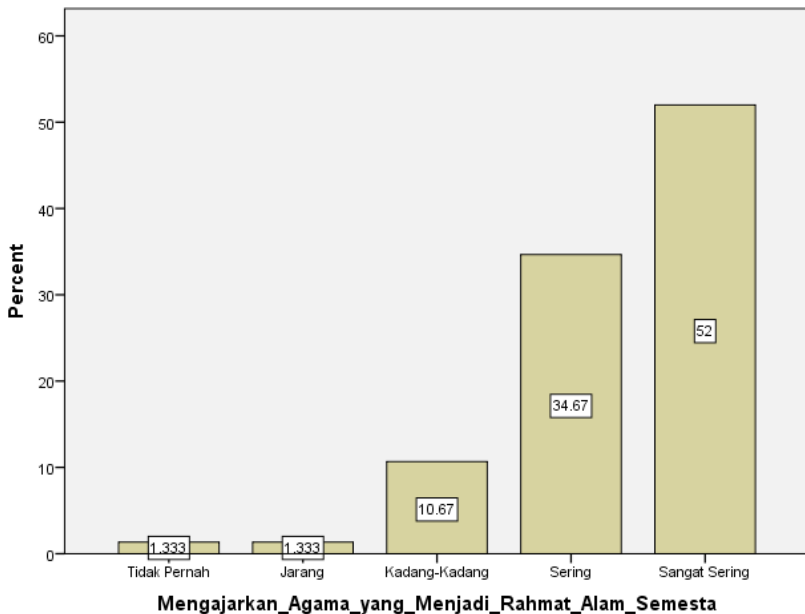


Diagram 7 Mengajarkan Agama yang Menjadi Rahmat Alam Semesta

c. Sikap Kritis dan Rasionalitas dalam Religiusitas

Meskipun beberapa aspek karakter utama religiusitas sering dan bahkan sangat sering diimplementasikan oleh guru kepada siswa tetapi para peserta didik belum melakukan implementasi secara optimal terhadap pandangan yang kritis dan rasional terhadap religiusitas.

Tabel 17 Mengajarkan Sikap Kritis dan Rasional dalam Beragama							
		Mengajarkan_Sikap_Kritis_dan_Rasional_ dalam_Beragama					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu			13.6%	63.6%	22.7%	Chi-Sq= 3.700; $p =$.448
	Poso	11.3%	3.8%	22.6%	39.6%	22.6%	
Total		8.0%	2.7%	20.0%	46.7%	22.7%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 17, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Chi-Sq= 3.700; $p = .448$) mengenai mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama di Kota Palu dan sekitarnya dan Kabupaten Poso. Terdapat jumlah total 87% responden kepala sekolah dan guru di Palu dan sekitarnya yang menyatakan sering (64%) dan sangat sering (23%) mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama jika dibandingkan dengan 63 % responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering (40%) dan (23%) menyatakan sangat sering. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Palu dan sekitarnya lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap kritis dan rasional telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Tabel 17 menunjukkan bahwa responden di Kota Palu dan sekitarnya tidak ada yang menjawab tidak pernah dan jarang, sedangkan yang

menjawab kadang-kadang sebanyak (14%). Namun, di Kabupaten Poso data menunjukkan yang menjawab tidak pernah 11 %, yang menjawab jarang 4% dan yang menjawab kadang-kadang 22%. Ini artinya bahwa sikap kritis dan rasional masih belum menjadi karakter utama dalam pengajaran PPK di Kabupaten Poso khususnya masih terdapat guru yang tidak pernah dan jarang mengajarkan sikap rasional dan kritis terhadap religiusitas.

Sikap rasional dalam beragama juga sekaligus mengandaikan adanya sikap komunikatif, yaitu sikap yang terbuka terhadap pemeluk agama lain dengan melakukan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan religiusitas, baik terhadap perbedaan pendapat dalam satu agama maupun di luar agama. Sikap komunikatif ini telah diimplementasikan dalam PPK di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso.

Tabel 18 menunjukkan bahwa para pendidik di Palu dan sekitarnya cenderung lebih besar mengimplementasikan sikap komunikatif itu ke dalam PPK yaitu sebesar 55% menjawab sering dan 41% menjawab sangat sering sehingga jumlah total adalah 96%. Sementara itu, peserta didik di Kabupaten Poso berjumlah 66 % menjawab sering dan 21% menjawab sangat sering sehingga kalau ditotal berjumlah 87 %. Sikap komunikatif yang tinggi ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah telah menyampaikan sikap komunikatif yang baik kepada peserta didik.

Tabel 18 Mengajarkan Sikap Komunikatif dalam Agama							
		Mengajarkan_Sikap_Komunikatif_dalam_Agama					Total
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu			4.5%	54.5%	40.9%	100.0%
	Poso	1.9%	3.8%	7.5%	66.0%	20.8%	100.0%
Total		1.3%	2.7%	6.7%	62.7%	26.7%	100.0%

d. Mengajarkan Toleransi Antarumat Beragama

Dalam kaitannya dengan sikap komunikatif, nilai toleransi menjadi penting. Sikap toleran menunjukkan hubungan kelompok kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah agama dan kepercayaan untuk saling memahami satu sama lain. Implementasi sikap toleransi ke dalam PPK di wilayah Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso sangat tinggi, di Kota Palu dan sekitarnya menunjukkan sebanyak 32% menjawab sering dan 64% menjawab sangat sering, yang kalau ditotal berjumlah 96%. Sementara itu, di Kabupaten Sambas terdapat 26% responden menjawab sering dan 72% responden menjawab sangat sering, seperti ditunjukkan pada Tabel 19 Bahkan, tidak ada seorang guru atau kepala sekolah yang menjawab tidak pernah dan jarang. Hal itu berarti bahwa mereka sangat intensif mengajarkan toleransi kepada peserta didik.

Tabel 19 Mengajarkan Toleransi Beragama					
		Mengajarkan_Toleransi_ Beragama			<i>Pearson Chi-Square; Signifikansi</i>
		Kadang- Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu	4.5%	31.8%	63.6%	Chi-Sq= 3.700; $p = .448$
	Poso	1.9%	26.4%	71.7%	
Total		2.7%	28.0%	69.3%	

Demikian pula di kedua wilayah penelitian Kota Palu, kabupaten sekitarnya, dan Kabupaten Poso para guru dan kepala sekolah sangat intensif mengajarkan hidup rukun dan damai antar pemeluk agama kepada peserta didik. Tabel 20 menunjukkan bahwa para guru dan kepala sekolah baik di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Kabupatn Poso tidak ada yang menjawab tidak pernah dan jarang. Bahkan, di Kabupatn Poso tidak ada seorang pun dari peserta didik menjawab kadang-kadang, semua peserta didik menjawab sering (25%) dan sangat sering (76%). Demikian pula di Kota

Palu dan Kabupaten sekitarnya yang menjawab sering (36%) dan yang menjawab sangat sering (51%).

Tabel 20 Mengajarkan Hidup Rukun dan Damai Antaromeluk Agama Lain					
		Mengajarkan Hidup Rukun dan Damai Antaromeluk Agama Lain			Total
		Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu	4.5%	36.4%	59.1%	100.0%
	Poso		24.5%	75.5%	100.0%
Total		1.3%	28.0%	70.7%	100.0%

2. Implementasi Karakter Nasionalisme

Dalam subbab ini akan diuraikan indikator-indikator apa saja yang menjadi ukuran dari pembinaan karakter nasionalisme di satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan yang memiliki masyarakat multikultur, ciri pembinaan karakter nasionalisme meliputi (1) mengajarkan kesetiaan kepedulian dan penghargaan budaya bangsa; (2) mengajarkan sikap rela berkorban; (3) mengajarkan sikap cinta damai; (4) mengajarkan sikap cinta tanah air; (5) mengajarkan sikap menjaga lingkungan; (6) mengajarkan sikap taat hukum; (7) mengajarkan sikap menghargai keragaman; dan (8) mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam.

Berikut ini adalah implementasi karakter utama nasionalisme yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah kepada peserta didik sebagai upaya untuk penguatan pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur.

Tabel 21 Karakter Utama Religiusitas Masyarakat Multikultur di Wilayah Palu dan Poso

BUTIR-BUTIR KUESIONER	TANGGAPAN (%)				
	Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
Mengajarkan kesetiaan kepedulian dan penghargaan budaya bangsa	-	2,7	2,7	48	46,7

Mengajarkan sikap rela berkorban	-	1,3	2,7	42,7	53,3
Mengajarkan sikap cinta damai	-	-	1,3	40	58,7
Mengajarkan sikap cinta tanah air	2,7	1,3	-	44	52
Mengajarkan sikap menjaga lingkungan	-	1,3	1,3	49,3	48
Mengajarkan sikap taat hukum	-	4	12	38,7	45,3
Mengajarkan sikap menghargai keragaman	-	-	2,7	38,7	58,7
Mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam	-	2,7	13,3	48	36

Tabel di atas menunjukkan karakter utama nasionalisme di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso. Secara khusus, sebagian besar responden (>80%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan kepada budaya bangsa; mengajarkan sikap menghargai keragaman; dan mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam. Sebagian besar kepala sekolah dan guru (>80%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan sikap rela berkorban dan sikap menjaga lingkungan. Sementara itu, sebagian besar responden juga (>80%) menyatakan mengajarkan sikap cinta damai, mengajarkan sikap cinta tanah air, dan mengajarkan sikap taat hukum.

Secara detail berikut ini dijelaskan mengenai hasil analisis deskriptif statistik terhadap persoalan-persoalan yang penting dalam implementasi karakter utama nasionalisme, antara lain, sikap menghargai keragaman, cinta tanah air, dan sikap taat terhadap hukum.

a. Mengajarkan Sikap Cinta kepada Tanah Air.

Nasionalisme merupakan sikap cinta kepada tanah air. Bagian ini ingin membandingkan sikap cinta kepada tanah air di dua wilayah penelitian Kota Palu dan kabupaten sekitarnya serta Kabupaten Poso.

Tabel 22 Mengajarkan Sikap Cinta Tanah Air						
		Mengajarkan Sikap Cinta Tanah Air				Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu			59.1%	40.9%	
	Poso	3.8%	1.9%	37.7%	56.6%	Chi-Sq= 3.593; $p = .309$
Total		2.7%	1.3%	44.0%	52.0%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan pada Tabel 22, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik (Chi-Sq= 3.593; $p = .309$) mengenai ‘mengajarkan sikap cinta tanah air’ antara Kota Palu dan kabupaten sekitarnya dengan Kabupaten Poso. Terdapat jumlah total 100% responden kepala sekolah dan guru di Kota Poso yang menyatakan sering (59%) dan sangat sering (52%) mengajarkan sikap cinta tanah air kepada siswa, dibandingkan dengan 94% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering 38% dan sangat sering 57%. Artinya, meskipun persentase tanggapan responden di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap cinta tanah air telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Berkaitan dengan pengajaran sikap cinta terhadap tanah air, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas bahwa para guru mengajarkan sikap cinta kepada tanah air melalui aktivitas, seperti melakukan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya, dan menghafal lima sila dari Pancasila.

Demikian pula sikap untuk rela berkorban demi tanah air berdasarkan atas tabel 21 terdapat responden guru dan kepala sekolah yang menjawab sering 43% dan sangat sering 53% sehingga kalau ditotal jumlahnya 96 %, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak pernah. Dari hasil analisis data kualitatif, implementasi sikap rela berkorban itu dapat dilihat dari kegiatan untuk mengumpulkan dana ketika terjadi musibah bencana alam di wilayah

Indonesia sebagai bentuk dari sikap rela berkorban kepada bangsa dan negara.

Dalam kaitannya dengan cinta terhadap tanah air itu, sikap cinta damai sangat diperlukan dalam membangun rasa nasionalisme. Sikap cinta damai itu, seperti ditunjukkan dalam Tabel 21, juga ditunjukkan melalui jawaban dari guru dan kepala sekolah yang menjawab sering 40% dan yang menjawab sangat sering 58%. Tidak ada satu pun dari responden yang menjawab tidak pernah dan jarang, hanya ada 1 % saja yang mengatakan kadang-kadang.

3. Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman

Nasionalisme dapat dibangun dengan baik jika antar warganya menghargai keberagaman. Tabel 23 menunjukkan bahwa di wilayah Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya serta Kabupaten Poso guru dan kepala sekolah sangat intens untuk mengajarkan tentang menghargai keberagaman. Berikut ini adalah perbandingan antara Kota Palu dan sekitarnya dengan Kabupaten Poso dalam pengajaran guru dan kepala sekolah mengenai sikap menghargai keragaman. Dari tabel tersebut terlihat bahwa baik di Kota Palu maupun Kabupaten Poso intensitas pengajaran guru dan kepala sekolah sangat memadai. Di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya terdapat 45,5% responden menjawab sering dan 54,5% responden menjawab sangat sering, sehingga kalau keduanya ditotal berjumlah 100%.

Sementara itu, di Kabupeten Poso terdapat 39% responden menjawab sering, dan 60% responden menjawab sangat sering sehingga kalau ditotal kedunya sebanyak 99%, sedangkan yang menjawab kadang-kadang hanya 3,8%.

Tabel 23 Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman					
		Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman			Total
		Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		45.5%	54.5%	100.0%
	Poso	3.8%	35.8%	60.4%	100.0%
Total		2.7%	38.7%	58.7%	100.0%

Penghargaan terhadap keragaman ini dapat terwujud melalui komunikasi yang baik antara kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Berikut ini adalah intensitas guru dan kepala sekolah dalam mengajarkan sikap komunikatif antarkelompok yang beragam kepada peserta didik di wilayah penelitian Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso. Tabel 24 menunjukkan bahwa di Kota Palu guru dan kepala sekolah menjawab sering (50%) dan yang menjawab sangat sering (36%) sehingga total berjumlah 86%, sedangkan yang menjawab tidak pernah tidak ada satu pun. Sementara itu, di Kabupaten Poso jawaban guru dan kepala sekolah yang menjawab sering berjumlah 47% dan menjawab sangat sering berjumlah 36%, jumlah keduanya sebesar 83%.

Tabel 24 Mengajarkan Sikap Komunikatif Antarkelompok yang Beragam						
		Mengajarkan Sikap Komunikatif Antarkelompok yang Beragam				Total
		Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		13.6%	50.0%	36.4%	100.0%
	Poso	3.8%	13.2%	47.2%	35.8%	100.0%
Total		2.7%	13.3%	48.0%	36.0%	100.0%

4. Mengajarkan Sikap Taat kepada Hukum

Sikap taat terhadap hukum merupakan salah satu sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme. Hukum dibangun atas kebersamaan. Orang yang cinta terhadap tanah air adalah orang yang bersikap taat terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut ini adalah intensitas guru dan kepala sekolah dalam mengajarkan sikap taat kepada hukum kepada peserta didik di wilayah penelitian Kota Palu dan kabupaten sekitarnya, serta Kabupaten Poso.

Tabel 25 Mengajarkan Sikap Taat Hukum						
		Mengajarkan_Sikap_Taat_Hukum				Total
		Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu	4.5%	13.6%	36.4%	45.5%	100.0%
	Poso	3.8%	11.3%	39.6%	45.3%	100.0%
Total		4.0%	12.0%	38.7%	45.3%	100.0%

Terdapat jumlah total 82% responden kepala sekolah dan guru di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya yang menyatakan sering (36%) dan sangat sering (46%) mengajarkan sikap taat hukum kepada siswa jika dibandingkan dengan 85 % responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering 40% dan sangat sering 45%. Sementara itu, di kedua wilayah itu tidak ada satu pun responden yang menjawab tidak pernah mengajarkan sikap taat terhadap hukum.

Berkaitan dengan pengajaran sikap taat terhadap hukum, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas dengan implementasi sikap taat hukum melalui kebiasaan-kebiasaan sekolah seperti mematuhi tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah dan mematuhi aturan-aturan kelas yang telah disepakati bersama.

Upaya untuk mematuhi tata tertib sekolah ini tercermin juga pada sikap menjaga lingkungan sekolah, seperti menjaga kebersihan lingkungan,

merawat tanaman-tanaman dan menjaga kebersihan sekolah. Diagram berikut ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah telah mengajarkan sikap untuk menjaga lingkungan kepada peserta didik, 49% menjawab sering, 48% menjawab sangat sering, jumlah keduanya sebesar 97%. Data ini menunjukkan guru dan kepala sekolah sangat intens dalam mengajarkan sikap menjaga terhadap lingkungan.

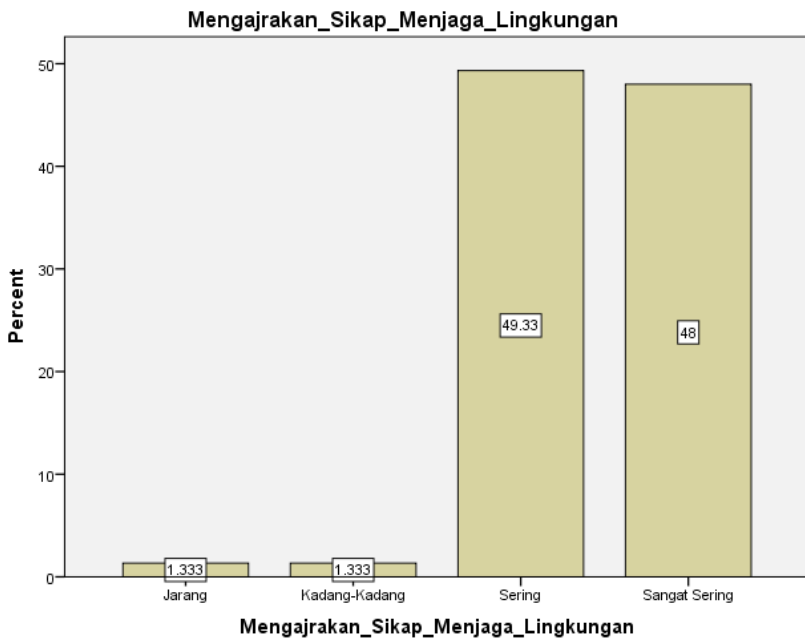


Diagram 8 Mengajarkan Sikap Menjaga Lingkungan

5. Implementasi Karakter Kemandirian

Seperti halnya di Kalimantan Barat, untuk mengukur karakter kemandirian dalam penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan di Sulawesi Tengah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasinya. Indikator-indikator dimaksud adalah (1) mengajarkan sikap sportif; (2) mengajarkan sikap demokratis; (3) mengajarkan sikap

komunikatif; (4) mengajarkan menjauhkan sikap etnosentrisme; dan (5) mengajarkan menjauhkan sikap egoisme individualisme.

Berikut ini adalah implementasi karakter utama kemandirian yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah kepada peserta didik sebagai upaya untuk penguatan pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur di Sulawesi Tengah.

Tabel 26 Karakter Utama Kemandirian dalam Masyarakat Multikultur

BUTIR-BUTIR KUESIONER	TANGGAPAN				
	Tidak pernah	Jarang	Kadang- kadang	Sering	Sangat Sering
Mengajarkan Sikap Sportif	-		2,7	46,7	50,7
Mengajarkan Sikap Demokratis	-	2,7	5,3	52	40
Mengajarkan Sikap Komunikatif	-	2,7	8	53,3	36
Mengajarkan Menjauhkan Sikap Etnosentrisme	1,3	2,7	-	46,7	49,3
Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme	1,3	2,7	4	41,3	50,7

Tabel 26 menunjukkan karakter utama kemandirian di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya serta Kabupaten Poso. Secara khusus, sebagian besar responden (>80%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan sikap sportif; sikap demokratis; dan sikap komunikatif untuk membentuk sikap pribadi yang penting dalam masyarakat multikultur. Sebagian besar juga kepala sekolah dan guru (>80%) menyatakan sering dan sangat sering mengajarkan menjauhkan sikap etnosentrisme dan menjauhkan sikap egoisme/individualisme. Secara detail berikut ini dijelaskan hasil analisis

deskriptif statistik terhadap persoalan-persoalan yang penting dalam implementasi karakter utama kemandirian.

a. Mengajarkan Sikap Demokratis

Sikap demokratis sangat diperlukan dalam masyarakat yang beragam, yang terkandung di dalamnya nilai kemandirian bagi siswa. Sikap demokratis mengandung sikap untuk berani mengungkapkan pendapat, serta kemampuan untuk menerima keputusan orang banyak. Berikut ini adalah intensitas guru dan kepala sekolah dalam mengajarkan sikap demokratis kepada peserta didik di dua wilayah penelitian Kota Palu dan kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso.

Tabel 27 Mengajarkan_Sikap_Demokratis						
		Mengajarkan Sikap Demokratis				Pearson Chi-Square, Signifikansi
		Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		4.5%	54.5%	40.9%	
	Poso	3.8%	5.7%	50.9%	39.6%	Chi-Sq=.912; $p=.823$
Total		2.7%	5.3%	52.0%	40.0%	

Berdasarkan hasil analisis data yang dipresentasikan pada Tabel 27, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\text{Chi-Sq}=.912$; $p=.823$) mengenai ‘mengajarkan sikap demokratis’. Terdapat jumlah total 95% responden kepala sekolah dan guru di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya yang menyatakan sering (54,5%) dan sangat sering (41%) mengajarkan sikap demokratis jika dibandingkan dengan (90,5 %) responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering 51% dan sangat sering 40%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran sikap demokratis telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

Berkaitan dengan pengajaran sikap demokratis, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas bahwa para guru mengimplementasikan sikap demokratis ini seperti dalam pemilihan ketua dan wakil kelas serta pemilihan wakil dan ketua OSIS.

Dalam demokrasi itu terkandung sikap komunikatif. Dari diagram berikut ini terlihat bahwa guru dan kepala sekolah telah mengajarkan sikap komunikatif ini kepada peserta didik. Di Palu dan kabupaten sekitarnya responden yang menjawab sering 50%, yang menjawab sangat sering sebanyak 36%, yang keduanya jika ditotal sejumlah 86%. Sementara itu, di Kabupaten Poso responden yang menjawab sering 55% dan yang menjawab sangat sering 36%, jumlah keduanya sebanyak 91%.

Tabel 28 Mengajarkan Sikap Komunikatif						
		Mengajarkan Sikap Komunikatif				Total
		Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		13.6%	50.0%	36.4%	100.0%
	Poso	3.8%	5.7%	54.7%	35.8%	100.0%
Total		2.7%	8.0%	53.3%	36.0%	100.0%

Dalam demokrasi itu diperlukan sikap sportif, yaitu kemampuan untuk dapat menerima kemenangan dan kekalahan secara elegan. Berdasarkan atas data kuantitatif dapat dilihat bahwa guru dan kepala sekolah telah mengajarkan sikap sportif kepada peserta didik. Tabel 29 memperlihatkan responden di Palu dan kabupaten sekitarnya yang menjawab sering 41%, yang menjawab sangat sering 59%. Jika ditotal jumlahnya sebesar 100% sehingga yang menjawab tidak pernah, jarang, kadang-kadang, tidak ada sama sekali, Sementara itu, di Kabupaten Poso responden yang menjawab sering sebanyak 49% dan yang menjawab sangat sering sebanyak 47% yang jika ditotal, jumlahnya sebanyak 96%. Sementara itu, yang menjawab tidak pernah dan jarang tidak ada sama sekali.

Tabel 29 Mengajarkan Sikap Sportif					
		Mengajarkan Sikap Sportif			Total
		Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu		40.9%	59.1%	100.0%
	Poso	3.8%	49.1%	47.2%	100.0%
Total		2.7%	46.7%	50.7%	100.0%

b. Menjauhkan Sikap Individualisme/Egoisme

Sikap individualism dan egoisme merupakan sikap yang mementingkan diri sendiri. Kebenaran diukur dari kebenaran sendiri. Sikap ini perlu dihindari dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang plural. Berikut ini adalah pengajaran guru dan kepala sekolah untuk menjauhkan sikap individualisme/egosentrisme dalam masyarakat multikultur di wilayah penelitian Kota Palu dan kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso.

Tabel 30 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme

		Mengajarkan Menjauhkan Sikap Egoisme Individualisme					Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu			4.5%	40.9%	54.5%	Chi-Sq= 1.362; p = .851
	Poso	1.9%	3.8%	3.8%	41.5%	49.1%	
Total		1.3%	2.7%	4.0%	41.3%	50.7%	

Berdasarkan data yang dipresentasikan dalam Tabel 30, tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\text{Chi-Sq} = 1.362$; $p = .851$) mengenai guru dan kepala sekolah yang mengajarkan menjauhkan sikap individualisme/egoisme. Terdapat jumlah total 95% responden kepala sekolah dan guru di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya yang menyatakan sering (41%) dan sangat sering (55%) mengajarkan agar menjauhkan sikap individualis/egoisme dalam masyarakat multikultur jika dibandingkan

dengan 91% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering 42% dan sangat sering 49%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Palu dan sekitarnya lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran menjauhkan sikap individualisme/egoisme dalam masyarakat multikultur telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

c. Menjauhkan sikap etnosentrisme

Etnosentrisme adalah sikap yang mendasarkan diri kepada kebenaran dari nilai dan budaya sendiri. Dalam masyarakat multikultur sikap etnosentrisme perlu dihindarkan. Berikut ini adalah pengajaran guru dan kepala sekolah untuk menjauhkan sikap etnosentrisme dalam masyarakat multikultur di wilayah penelitian Kota Palu dan kabupaten sekitarnya, dan Kabupaten Poso.

Tabel 31 Mengajarkan Menjauhkan Sikap Etnosentrisme						
		Mengajarkan_Menjauhkan_Sikap_ Etnosentrisme				Pearson Chi-Square; Signifikansi
		Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sangat Sering	
Lokasi Penelitian	Palu			45.5%	54.5%	Chi-Sq= 1.427; $p = .699$
	Poso	1.9%	3.8%	47.2%	47.2%	
Total		1.3%	2.7%	46.7%	49.3%	

Hasil analisis data yang dipresentasikan dalam Tabel 31 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tanggapan yang signifikan secara statistik ($\text{Chi-Sq} = 1.427$; $p = .699$) mengenai guru dan kepala sekolah 'mengajarkan menjauhkan sikap etnosentrisme. Terdapat jumlah total 100% responden kepala sekolah dan guru di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya yang menyatakan sering (45,5%) dan sangat sering (54,5%) mengajarkan agar

menjauhkan sikap etnosentrisme dalam masyarakat multikultur jika dibandingkan dengan 96% responden kepala sekolah dan guru di Kabupaten Poso yang menyatakan sering 48% dan sangat sering 46%. Artinya, kendatipun persentase tanggapan responden di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya lebih tinggi menyatakan sering dan sangat sering, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa pengajaran menjauhkan sikap etnosentrisme dalam masyarakat multikultur telah dilakukan di kedua lokasi tersebut.

BAB IV

TANTANGAN IMPLEMENTASI PPK DI DAERAH MULTIKULUR

Problem dalam masyarakat multikultur di Indonesia ke depan dipastikan terus bergulir, seperti konflik antaretnis dan agama serta persoalan kelompok dan golongan, yang seringkali menimbulkan perpecahan yang mengancam kesatuan NKRI. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan pendidikan karakter (PPK) untuk mengajarkan peserta didik tentang bagaimana bersikap atau beretika dalam masyarakat multikultur. Jika dilaksanakan, kebijakan implementasi PPK nilai-nilai multikultur ini akan berdampak sebagai berikut.

1. PPK dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai masyarakat multikultur (seperti nilai kerukunan, persaudaraan, toleransi, keadilan, kejujuran, dan komunikatif) sehingga peserta didik dapat bersikap secara etis dalam masyarakat yang beragam. Peserta didik akan mempunyai kesadaran bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang multikultur sehingga peserta didik mempunyai orientasi untuk hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural.
2. Kesadaran sikap yang ditanamkan melalui nilai-nilai multikultur dalam PPK dapat meredam konflik dalam masyarakat yang plural karena telah ditanamkan di sekolah yang akan berimbas kepada

peserta didik dalam bersikap di masyarakat dan lingkungan mereka. Sementara itu, nilai-nilai masyarakat multikultur pada PPK jika tidak diimplementasikan, akan membuat peserta didik tidak mempunyai pemahaman atau mempunyai pemahaman yang minim tentang etika sebagai orientasi bersikap dalam masyarakat yang plural yang rentan terhadap pengaruh sikap negatif, yaitu:

- a. Pengaruh sikap eksklusivisme yang cenderung menutup diri dari pergaulan selain dari agama/keyakinannya dan kelompoknya; dan etnosentrisme, yaitu sikap yang berpusat pada etnisitas sebagai pendorongnya, yang menilai segala sesuatunya berdasarkan atas nilai dan dasar budaya sendiri.
- b. Hilangnya sikap rasional dan kritis dalam menghadapi persoalan yang terkait dengan persoalan religiusitas, sehingga cenderung bersikap fundamentalisme terhadap pemahaman agama, yang menganggap bahwa pemahamannya adalah yang paling benar, sedangkan yang lain adalah salah.
- c. Pengaruh media sosial, seperti berita bohong atau hoaks yang semakin merebak yang pengaruhnya dapat merusak hubungan baik antar umat beragama, etnis, kelompok dan golongan, yang secara luas dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa seluruh karakter utama PPK, yaitu karakter religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian telah diterapkan di empat SMP yang dipilih sebagai sasaran penelitian. Karakter utama dalam masyarakat multikultur tercermin dalam butir-butir pertanyaan yang dapat dibuktikan dengan analisis statistik deskriptif serta dalam analisis kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para responden. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan intensitas dan kualitas dalam penerapannya dari tiga karakter tersebut.

Implementasi karakter utama dalam masyarakat multikultur di sekolah menengah pertama di empat lokasi dapat dikategorikan sebagai berikut.

Pertama, sekolah *piloting* PPK telah melaksanakan sikap/etika masyarakat multikultur, seperti pada SMP Negeri di Kota Palu. **Kedua**, sekolah bukan *piloting* PPK, telah mengimplementasikan beberapa atau sebagian sikap/etika masyarakat multikultur berdasarkan atas visi dan misi sekolah, seperti yang terdapat pada SMP Negeri 2 Sambas, SMP Negeri 7 Pontianak, dan SMP Negeri 1 Poso.

Pada umumnya karakter religiusitas diimplementasikan secara simbolik di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penelitian, seperti aktivitas ritual dan bacaan Al-Quran, dan hapalan, implementasi karakter religiusitas belum menyentuh spirit agama, yaitu untuk membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan, serta upaya untuk membangun peradaban manusia yang maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karakter nasionalisme di sekolah-sekolah tersebut pada umumnya juga diimplementasikan cenderung bersifat normatif-simbolik berupa praktik cinta negara dengan melaksanakan hapalan Pancasila, melakukan upacara bendera, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Karakter kemandirian juga secara umum menunjukkan hal yang sama seperti nilai demokratis dan komunikatif, sudah diimplementasikan dalam aktivitas sekolah, seperti dalam pemilihan Ketua OSIS dan ketua kelas, tetapi nilai demokratis dan komunikatif belum menjadi kesadaran sebagai nilai yang penting bagi masyarakat multikultur.

Atas dasar implementasi dari ketiga nilai tersebut, diperlukan adanya strategi implementasi nilai-nilai multikultur dalam PPK yang dilaksanakan dalam tiga jalur: (1) melalui kurikulum atau intrakurikuler yang dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti mata pelajaran seni budaya yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran keragaman; (2) dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler, seperti pondok belajar berbasis kearifan lokal yang berisi permainan tradisional dan buku seni dan budaya; dan (3) melalui jalur ekstrakurikuler. Hal yang sangat penting adalah implementasi PPK masih dianggap jauh dari harapan karena kurang melibatkan keluarga dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya

kebijakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai multikultur kepada peserta didik yang dilakukan secara sinergis antara sekolah, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pusat. Pemerintah Pusat sebagai pemegang kebijakan PPK dapat melaksanakan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut.

1. Diperlukan kebijakan terkait dengan pendidikan multikultur agar diterapkan di pengajaran sekolah seluruh Indonesia didahului oleh penyusunan kurikulum.
2. Diperlukan kebijakan dalam menguatkan murid berkarakter dalam masyarakat multikultur melalui mata pengajaran tematik agama dan sains. Persoalan yang terkait dengan ekstrimisme dan fundamentalisme akarnya adalah persoalan rasionalitas. Tanpa nalar agama akan dihasilkan fanatisme. Karena itu, sains sebagai cara berpikir secara rasional dan ilmiah sangat diperlukan untuk menginternalisasi sikap agama yang tekstual.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap penyediaan buku-buku untuk literasi terkait dengan tokoh-tokoh ilmuwan agama dan tokoh-tokoh ilmuwan Barat terkait perkembangan ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan religiusitas.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus perlu menyusun materi PPK nilai-nilai multikultur dan strategi implementasinya sebagai materi dalam penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik di wilayah masyarakat multikultur.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memasukkan nilai-nilai religiusitas itu ke dalam mata pelajaran yang terkait seperti biologi, kimia, fisika, dan mata pelajaran lainnya yang dapat menyampaikan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam ilmu pengetahuan, baik IPA maupun IPS. Karena itu, religiusitas tidak hanya dipahami sebatas ritual dan pemahaman secara tekstual, tetapi dipahami melalui proses penerapannya dalam ilmu pengetahuan.

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan sosialisasi pentingnya nilai-nilai multikultur dalam PPK, yang sangat efektif melalui beberapa fasilitas jejaring internet kepada para pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah, serta masyarakat dan keluarga.
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengalokasikan dana khusus untuk program kegiatan PPK yang di dalamnya adalah untuk nilai-nilai multikultur, yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kerawanan konflik sosial sebagai akibat dari dinamika masyarakatnya yang multikultur.

Pemerintah Daerah juga mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan PPK di wilayah multikultur. Ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah, di antaranya, adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan kebijakan tentang implementasi nilai-nilai religiusitas dengan menekankan kegiatan literasi buku-buku dan bacaan-bacaan yang mengungkapkan keagungan dan kekuasaan Tuhan dari pemikiran dan karya tokoh-tokoh, baik ilmuwan agama maupun ilmuwan Barat terkait dengan perkembangan pengetahuan dan peradaban manusia.
2. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan kebijakan implementasi nilai-nilai multikultur ini melalui aktivitas di luar sekolah, seperti kunjungan ke rumah jompo atau yatim piatu untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Demikian juga aktivitas yang menumbuhkan nilai toleransi, seperti bekerja bakti di rumah ibadah atau melakukan kegiatan lain di luar sekolah untuk menumbuhkan penghayatannya terhadap nilai-nilai multikultur.
3. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan kebijakan implementasi nilai-nilai multikultur itu melalui aktivitas KIR (karya ilmiah remaja), sehingga siswa didorong untuk melakukan aktivitas

yang bersifat ilmiah bersentuhan dengan masyarakat dan lingkungannya, mengenai persoalan yang terkait dengan nilai-nilai multikultur. Dengan demikian, nilai-nilai multikultur itu dipahami tidak secara verbal di sekolah, tetapi didalami dan dihayati melalui kegiatan ilmiah.

Sekolah merupakan ujung tombak PPK di wilayah multikultur. Ada beberapa kebijakan dan program yang perlu dilakukan oleh sekolah, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Sekolah perlu melakukan identifikasi persoalan-persoalan terkait dengan nilai-nilai multikultur dalam masyarakat dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, sekolah merancang program PPK untuk mengimplementasikan nilai-nilai multikultur kepada peserta didik.
2. Sekolah mengidentifikasi segala potensi dalam masyarakat yang dapat diajak bekerja sama dalam meningkatkan cara bersikap dalam masyarakat multikultur kepada peserta didik, antara lain, panti sosial, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, para seniman dan budayawan dilibatkan untuk mengenalkan kearifan lokal yang dapat menumbuhkan sikap kerukunan, cinta damai, dan solidaritas.
3. Sekolah perlu melakukan kerja sama dengan orang tua dalam rangka meningkatkan PPK dalam masyarakat multikultur. Tanggung jawab PPK di wilayah multikultur ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga orang tua yang perlu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam masyarakat multikultur ini kepada putra dan putrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, C. Azyumardi, 2015. "Akar Konflik Keragaman, Scaling Up Kebudayaan dan Penguatan Dialog". Dalam Seminar Nasional Kebudayaan Membingkai Kebhinekaan, Merayakan Persatuan, Kebijakan Kebudayaan dalam Mengelola Keragaman. Jakarta: Pusat: Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Borradori, G. 2003. *Philosophy in a Time of Teror. Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Almond, G. and Verba, S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. English: SAGE Publications.
- Gellner, E. 1983. *Nation and Nationalism, New Perspective on The Past*. England: Basil Blackwell.
- Habermas, J. 2007. *Moral Consciousness and Communicative Action*. UK: Polity Press.
- Horvath, D. 2009. *Tracing Cosmopolitan Strands in EU Citizenship*. Diambil kembali dari <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p14661/mobile/ch02.html>.
- Kieser, B. 2004 (November-Desember). Agama Bubar jika Tidak Bercampur

- Nalar: Being religious a la Habermas. Dalam *Basis Menembus Fakta*. Magnis-Suseno, F. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. 2004 (November-Desember). 75 Tahun Jurgen Habermas. *Basis Menembus Fakta*, p. 5. *Basis Menembus Fakta*, hal. 5.
- Magnis-Suseno, F. (2004, November-Desember). Edisi 75 Tahun Jurgen Habermas. *Basis Menembus Fakta*, hal. 5.
- Mikka Wildha Nurrochsyam. 2018. *Kajian Pemanfaatan Permainan Tradisional sebagai Wahana Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Mistardianto. 2019. (Selasa, 17 September). "Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur." (M. W. Nurrochsyam, Pewawancara)
- Mu'jizah. 2014. *Mencari Jejak Menelusuri Sejarah*. Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Pamungkas, C. (2015). Religious Identification and Social Distance Between Religious Groups in Yogyakarta. *Humaniora*, 141-155.
- Parekh, B. 2008. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riswanda Setiadi dkk. 2017. *Evaluasi Penyelenggaraan Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Piloting*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- Riswanda Setiadi, dkk. (2017). *Evaluasi Penyelenggaraan Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Piloting*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- Sarnastri. 2019. (Rabu, 18 September). "Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur." (M. W. Nurrochsyam, Pewawancara)
- Susanto, B. H. 2017. "Pengembangan Permainan Tradisional Untuk Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol.2, No.2 (Desember).
- Theresiana Ani Larasati, E. S. 2014. *Kajian Awal Implementasi Karakter*

*Berbasis Budaya pada Tingkat Sekolah Dasar di Daerah Istimewa
Yogyakarta.* Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)
Yogyakarta.

Yabidi. 2019 (18 September). "Penguatan Pendidikan Karakter dalam
Masyarakat Multikultur." (M. W. Nurrochsyam, Pewawancara)

Buku berjudul Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan kepada pengampu kepentingan dan pembaca secara umum mengenai problem pendidikan karakter dalam masyarakat Indonesia yang plural. Problem tersebut ke depan dimungkinkan terus bergulir, seperti persoalan antar-etnis, agama, dan persoalan kelompok serta golongan, yang sering kali menimbulkan perpecahan yang mengancam kesatuan NKRI. Untuk itu, perlu upaya penguatan karakter untuk mengajarkan kepada peserta didik agar mampu bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Buku ini memaparkan implementasi pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur. Keragaman yang ada di Indonesia baik etnis dan agama jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persoalan serius. Diharapkan buku ini dapat memberikan masukan baik dari segi materi maupun implementasi pendidikan karakter yang efektif dalam pembelajaran kepada peserta didik. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai masyarakat multikultur, seperti kerukunan, persaudaraan, toleransi, keadilan, kejujuran, dan nilai komunikatif. Kesadaran sikap terhadap nilai-nilai multikultur yang telah ditanamkan akan berimbas kepada sikap peserta didik. Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial tersebut diharapkan peserta didik dapat bersikap etis di tengah masyarakat.



**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020**

ISBN 978-602-0792-68-2



9 786020 792682